

WARTA PEMERIKSA



Mendorong Peningkatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

IHPS I TAHUN 2023
MEMUAT RINGKASAN
DARI 705 LAPORAN
HASIL PEMERIKSAAN
(LHP).



10

IHPS I 2023
Dorong Perbaikan
Tata Kelola
Keuangan Negara

22

BPK Paparkan
Arti Penting
Keterlibatan
Indonesia di IMO

35

SIAP Connect
Permudah
Proses
Pemeriksaan



PENGARAH

Isma Yatun
Hendra Susanto
Nyoman Adhi Suryadnyana
Daniel Lumban Tobing
Haerul Saleh
Ahmadi Noor Supit
Pius Lustrilanang
Slamet Edy Purnomo

PENANGGUNG JAWAB

Bahtiar Arif

WAKIL PENANGGUNG JAWAB

R. Yudi Ramdan Budiman

KETUA TIM REDAKSI

Sri Haryati

KEPALA SEKRETARIAT

Bestantia Indraswati

SEKRETARIAT

Fitri Yuliantri Permana
Klara Ransingin
Ridha Sukma
Sigit Rais
Apriyana
Sudarman

ALAMAT SEKRETARIAT

Gedung BPK-RI
Jalan Gatot Subroto no 31
Jakarta
Telepon: 021-25549000
Pesawat 1188/1187
Email: wartapemeriksa@bpk.go.id
www.bpk.go.id

DITERBITKAN OLEH

Sekretariat Jenderal
Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Pemeriksa BPK dilarang meminta/menerima uang/barang/fasilitas lainnya daripihak yang terkait dengan pemeriksaan.

(Sumber: Peraturan BPK 4/2018 tentang Kode Etik BPK)

Hasil tindak lanjut pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi isu utama dari *Warta Pemeriksa* edisi November 2023. Pentingnya isu ini tergambar pada saat penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam kesempatan itu, Ketua BPK Isma Yatun menyebutkan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan bagian krusial dalam memaksimalkan dampak pemeriksaan bagi mekanisme akuntabilitas dan transparansi dalam kerangka *good governance*. "Sinergi dan integrasi antara BPK dan DPR adalah aspek fundamental untuk mewujudkan hal tersebut," ujar Isma dalam penyampaian IHPS I tahun 2023 kepada pimpinan DPR di Jakarta, Selasa (5/12/2023).

IHPS I tahun 2023 memuat ringkasan dari 705 laporan hasil pemeriksaan (LHP), yang terdiri atas 681 LHP keuangan, 2 LHP kinerja, dan 22 LHP dengan tujuan tertentu (DTT). LHP tersebut mengungkap 9.261 temuan yang mencakup kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan, serta ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E) dengan nilai keseluruhan sebesar Rp18,19 triliun. Atas hasil pemeriksaan tersebut, selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang dan/atau penyerahan aset sebesar Rp852,82 miliar.

Laporan lain yang redaksi siapkan, yaitu BPK dipercaya mengemban tanggung jawab sebagai sekretariat organisasi lembaga pemeriksa negara-negara anggota ASEAN (ASEANSAI) periode 2024-2029. Sebelumnya, BPK telah menjalankan perannya sebagai sekretariat ASEANSAI sejak pembentukan ASEANSAI pada 2011.

Sebagai sekretariat ASEANSAI, BPK berperan sebagai penggerak untuk memastikan kegiatan yang direncanakan berjalan dengan baik. Selain itu, sekretariat ASEANSAI juga bertanggung jawab mengelola kesekretariatan dan pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan ASEANSAI. Termasuk berperan dalam pengembangan kerja sama ASEANSAI dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*). Selamat menikmati. ~



4 » Mendorong Peningkatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

IHPS I Tahun 2023 memuat ringkasan dari 705 laporan hasil pemeriksaan (LHP).



7 » Apresiasi untuk Pemda yang Menyelesaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu

Hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2022 menunjukkan adanya penurunan opini BPK dibanding tahun sebelumnya.

10 » IHPS I 2023 Dorong Perbaikan Tata Kelola Keuangan Negara

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 9.261 temuan yang memuat 15.689 permasalahan sebesar Rp18,19 triliun.



- 14 » BPK Sampaikan 25 Pemeriksaan Investigatif dengan Indikasi Kerugian Rp31.55 Triliun
- 16 » Mencegah Kecurangan pada Laporan Keuangan
- 20 » BPK Bertekad Kembali Menjadi Auditor Eksternal IMO
- 22 » BPK Paparkan Arti Penting Keterlibatan Indonesia di IMO
- 24 » BPK Dipercaya Sebagai Sekretariat ASEANSAI Periode 2024-2029
- 26 » Ketua BPK dan Dubes Australia Sepakat Soal Kesempatan untuk Perempuan
- 27 » BPK Berbagi Pengetahuan dan Pengalaman dengan SAI Arab Saudi
- 30 » Berpikir dan Memandang *Out of The Box* Lewat Buku *Bagai Novel*
- 33 » *I-MESSAGE*, Model Komunikasi Setara ala Virginia Satir
- 35 » SIAP Connect Permudah Proses Pemeriksaan
- 37 » BPK Harapkan Komunikasi dengan PT Pindad Dapat Berjalan Efektif
- 38 » Anggota V BPK: Jangan Hanya Fokus Terhadap Angka, tapi Juga Dampak Nyata untuk Masyarakat
- 40 » BPK Perwakilan Diminta Responsif Terhadap Kebutuhan Masyarakat Lokal
- 42 » Kolaborasi dan Sinergi dalam Pengelolaan Implementasi Renstra BPK 2020-2024
- 45 » Pelaporan Kinerja Untuk Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Negara
- 52 » Berita Foto



■ Penyampaian IHPS I Tahun 2023 oleh Ketua BPK, Isma Yatun kepada pimpinan DPR di Jakarta.

Mendorong Peningkatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

IHPS I TAHUN 2023 MEMUAT RINGKASAN DARI 705 LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Presiden. IHPS I Tahun 2023 memuat ringkasan dari 705 laporan hasil pemeriksaan (LHP), yang terdiri atas 681 LHP Keuangan, 2 LHP Kinerja, dan 22 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT).

LHP tersebut mengungkap 9.261 temuan yang mencakup kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan, serta ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E) dengan nilai keseluruhan sebesar Rp18,19 triliun. Atas hasil pemeriksaan tersebut, selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang dan/ atau penyerahan aset sebesar Rp852,82 miliar.

Dalam penyampaian IHPS I 2023 kepada DPR, Ketua BPK Isma Yatun menyampaikan, sinergi antara BPK dan lembaga legislatif tersebut sangat penting untuk mendukung tindak lanjut pemeriksaan. Isma menyampaikan, optimalisasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK oleh Pemerintah merupakan bagian krusial dalam memaksimalkan dampak pemeriksaan bagi mekanisme akuntabilitas dan transparansi dalam kerangka *good governance*.

"Sinergi dan integrasi antara BPK dan DPR adalah aspek fundamental untuk mewujudkan hal tersebut," ujar Isma dalam penyampaian IHPS I Tahun 2023 kepada pimpinan DPR di Jakarta, Selasa (5/12/2023).

IHPS I Tahun 2023 memuat 134 hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2022 pada pemerintah pusat, di antaranya adalah 81 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dengan 80 opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan 1 Wajar Dengan Pengecualian (WDP), serta 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dengan opini WTP. Selain itu juga memuat 40 laporan keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dengan opini 33 WTP, 6 WDP, dan 1 Tidak Wajar (TW). BPK juga telah memeriksa 542 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022, serta empat laporan keuangan badan lainnya tahun 2022, yaitu LK Tahunan Bank Indonesia, LK Otoritas Jasa Keuangan, LK Lembaga Penjamin Simpanan, dan LK Badan Pengelola Keuangan Haji.

IHPS ini juga memuat dua hasil pemeriksaan kinerja dengan tema prioritas nasional penguatan ketahanan ekonomi. Pemeriksaan kinerja tersebut antara lain pengelolaan batu bara, gas bumi, dan energi terbarukan dalam pengembangan sektor ketenagalistrikan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan energi TA 2020 sampai semester I 2022 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).



Sinergi dan integrasi antara BPK dan DPR adalah aspek fundamental untuk mewujudkan hal tersebut.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa Pemerintah telah melakukan penyusunan *road map* menuju *Net Zero Emissions* (NZE) pada tahun 2060 dan mengamankan pasokan batu bara dan gas bumi untuk kepentingan dalam negeri. Namun, masih terdapat permasalahan antara lain, belum dilakukan sepenuhnya mitigasi risiko atas skenario transisi energi menuju NZE pada tahun 2060 dan rendahnya kemajuan proyek Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang berpotensi terjadinya kekurangan pasokan pada sebagian besar sistem kelistrikan nasional.

Pada pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) di antaranya atas pendapatan, biaya, dan investasi pada 11 BUMN atau anak perusahaannya. Permasalahan signifikan antara lain pemberian uang muka perikatan perjanjian jual beli gas (PJBG) tidak didukung mitigasi risiko dan jaminan yang memadai. Selain itu, tarif layanan khusus sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM kepada pelanggan premium belum sepenuhnya diterapkan oleh PT PLN.

Di hadapan para pimpinan DPR, Isma juga menyampaikan capaian kapasitas kelembagaan BPK, terutama di kancah Internasional. Selain memimpin Panel Pemeriksa Eksternal Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2022-2023 November lalu, BPK juga masih dipercaya sebagai pemeriksa eksternal atas beberapa lembaga internasional.

Di antaranya pada Inter-Parliamentary Union untuk periode 2023 hingga 2025, World Intellectual Property Organization (atau WIPO) periode 2024 hingga 2029, serta *external auditor* untuk International Maritime Organization (IMO), termasuk World Maritime University dan International Maritime Law Institute periode 2024 hingga 2027.



■ Ketua BPK, Isma Yatun berbincang dengan Presiden Joko Widodo setelah penyampaian IHPS I Tahun 2023.

Selain itu, BPK juga terpilih sebagai tuan rumah International Congress of Supreme Audit Institutions (atau INCOSAI) ke-26 pada Tahun 2028 dan menjadi Ketua Organisasi BPK se-dunia atau International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) periode 2028 hingga 2031 serta menjadi sekretariat organisasi lembaga pemeriksa negara-negara anggota ASEAN (atau ASEANSAI) periode 2024 hingga 2029.

"Torehan prestasi tersebut merupakan perwujudan atas dedikasi dan sinergi dengan para *stakeholders* BPK, terutama DPR RI," ungkap Isma.

Sementara, dalam penyampaian IHPS I Tahun 2023 kepada Presiden Joko Widodo pada Jumat (8/12/2023), Isma menyampaikan pihaknya turut mengawal program pembangunan pemerintah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

IHPS I Tahun 2023 selain mencakup pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan lainnya, juga memuat pemeriksaan atas empat tema prioritas nasional, yaitu penguatan ketahanan ekonomi, pengembangan wilayah, penguatan infrastruktur, serta penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, termasuk terkait SDGs.

IHPS I Tahun 2023 mengungkapkan hasil pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dari tahun 2005 sampai dengan semester I 2023, menunjukkan sebanyak 76,9 persen telah sesuai rekomendasi BPK. Untuk periode RPJMN 2020 hingga semester I 2023 tindak lanjut yang telah sesuai baru mencapai 47,0 persen. Dari tindak lanjut rekomendasi tersebut, BPK telah melakukan penyelamatan uang dan aset negara berupa penyerahan aset dan atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan atas hasil pemeriksaan periode RPJMN 2020-semester I 2023, sebesar Rp19,20 triliun.

"Kami mengharapkan dukungan Bapak Presiden dalam mendorong jajaran pimpinan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, Badan Lainnya agar segera menindaklanjuti rekomendasi BPK," ungkap Isma. ~

Kami mengharapkan dukungan Bapak Presiden dalam mendorong jajaran pimpinan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, Badan Lainnya agar segera menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Apresiasi untuk Pemda yang Menyelesaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu

HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD TAHUN 2022 MENUNJUKKAN ADANYA PENURUNAN OPINI BPK DIBANDING TAHUN SEBELUMNYA.

Badan Pemeriksa Keuangan mengapresiasi upaya dan kerja keras pemerintah daerah karena seluruh pemda dapat menyelesaikan laporan keuangan tepat waktu. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, atau pada tahun 2018 hingga 2022, opini laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) secara keseluruhan mengalami perbaikan.

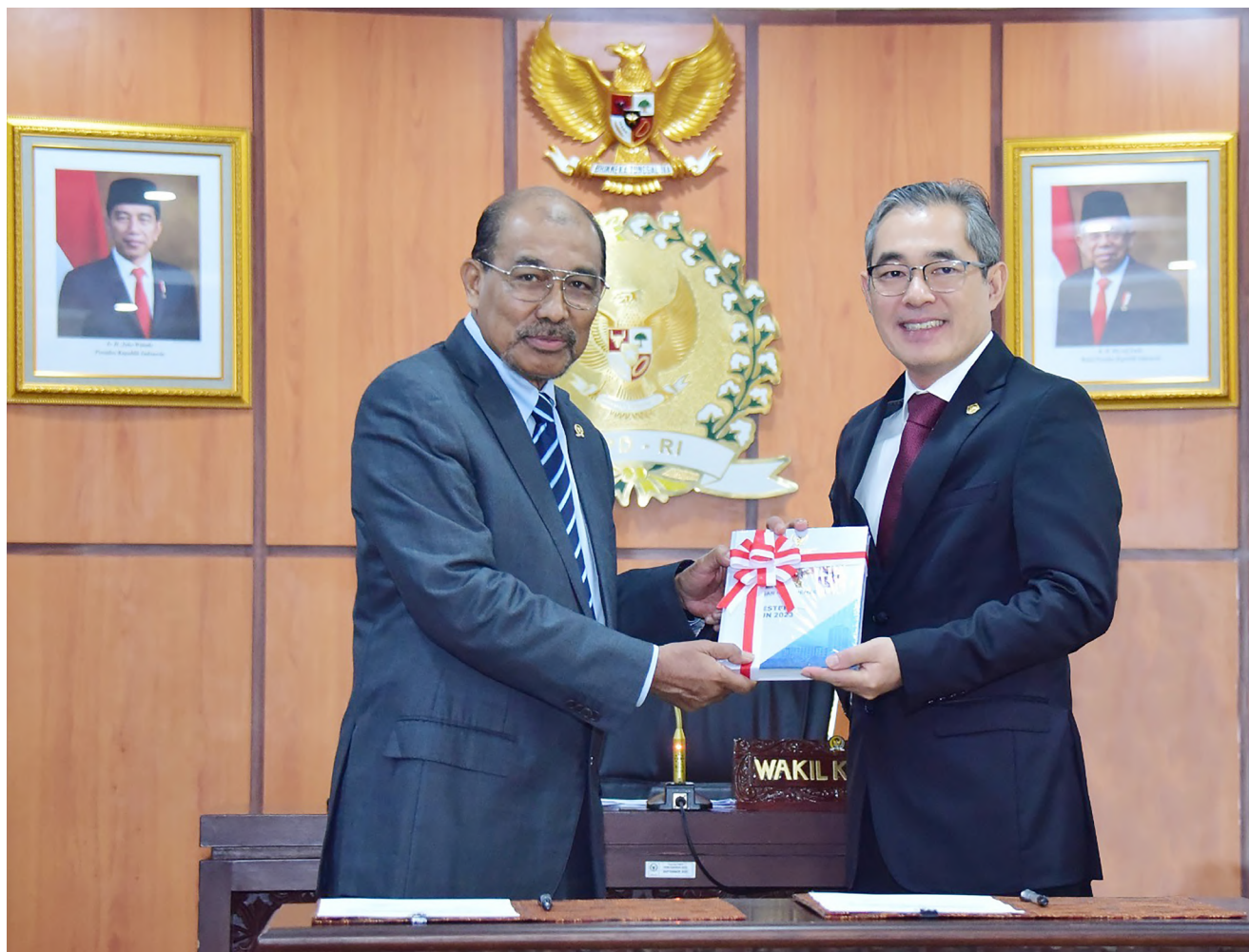
“Upaya yang telah dilakukan oleh pemda antara lain melakukan identifikasi, verifikasi, mengesahkan bukti-bukti pengeluaran, serta melakukan koreksi-koreksi yang diperlukan dan penyetoran ke kas daerah atas pengeluaran yang belum disahkan Bendahara Umum Daerah (BUD) dan belum tercatat dalam laporan keuangan. Pemda juga melakukan inventarisasi aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya, dikuasai pihak lain, dan dicatat secara gabungan, serta melakukan pemulihan atas kelebihan pembayaran belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan serta gedung dan bangunan, dengan menyetor ke kas daerah,” ungkap Wakil Ketua BPK, Hendra Susanto pada penyampaian IHPS I Tahun 2023 kepada pimpinan DPD.



■ Wakil Ketua BPK, Hendra Susanto



“Dorongan dari pimpinan dan anggota DPD kepada para kepala daerah adalah hal krusial untuk meningkatkan komitmen pimpinan entitas dalam percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK sebagai upaya bersama memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah.”



■ Wakil Ketua BPK, Hendra Susanto menyampaikan IHPS I Tahun 2023 kepada pimpinan DPD.

Terhadap 542 LKPD Tahun 2022 yang diperiksa, BPK memberikan 496 opini Wajar Tanpa Pengecualian/WTP (91 persen dari jumlah keseluruhan pemerintah daerah). Sementara itu, terdapat 41 pemerintah daerah yang mendapatkan opini WDP dan 5 pemerintah daerah yang mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, atau pada tahun 2018 hingga 2022, opini LKPD secara keseluruhan mengalami perbaikan.

Namun, hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2022 menunjukkan adanya penurunan opini BPK dibanding tahun sebelumnya yaitu, dari WTP, menjadi WDP pada 2 Pemprov, 12 Pemkab dan 4 Pemkot, serta dari WTP menjadi TMP pada 1 Pemkab. Capaian opini WTP LK Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Tahun 2022 telah melampaui target RPJMN 2020-2024 masing-masing sebesar 93 persen dan 82 persen, sedangkan capaian opini WTP pada LK Pemerintah Kota masih di bawah target sebesar 93 persen.

Permasalahan yang memengaruhi kewajaran penyajian LKPD Tahun 2022 sehingga belum memperoleh opini WTP, antara lain ketekoran kas di

Bendahara Pengeluaran belum dipulihkan dengan penyeteroran ke kas daerah; Aset tetap tidak dicatat dan/atau tidak dapat ditelusuri keberadaannya; Realisasi belanja barang dan jasa tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban; dan kelebihan pembayaran karena kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan, serta proses perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan yang tidak mematuhi ketentuan, belum dipulihkan dengan penyeteroran ke kas daerah.

Sejak tahun 2005 hingga Semester I 2023, BPK telah menyampaikan 697.383 rekomendasi kepada seluruh entitas yang diperiksa. Khusus untuk pemerintah daerah dan BUMD, rekomendasi yang diberikan sebanyak 566.815 rekomendasi atau 81% dari total rekomendasi.

"Dorongan dari pimpinan dan anggota DPD kepada para kepala daerah adalah hal krusial untuk meningkatkan komitmen pimpinan entitas dalam percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK sebagai upaya bersama memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah," ungkap Hendra. ~



@bpkriofficial



www.bpk.go.id



BPK RI Official



@bpkri



@humasbpkri.official



08111907010



@bpk.ri



▶ BPK menyediakan saluran komunikasi sebagai komitmen mendukung akuntabilitas dan keterbukaan informasi untuk menjalin komunikasi dengan para pemangku kepentingan.



IHPS I 2023

Dorong Perbaikan Tata Kelola Keuangan Negara

**HASIL PEMERIKSAAN BPK MENGUNGKAPKAN 9.261 TEMUAN
YANG MEMUAT 15.689 PERMASALAHAN SEBESAR RP18,19 TRILIUN.**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah merampungkan penyusunan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2023 disusun. Ikhtisar ini merupakan ringkasan dari 705 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester I tahun 2023 yang terdiri atas 681 LHP keuangan (96,6 persen), 2 LHP kinerja (0,3 persen), dan 22 LHP dengan tujuan tertentu/DTT-Kepatuhan (3,1 persen).

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 9.261 temuan yang memuat 15.689 permasalahan sebesar Rp18,19 triliun. Hal itu meliputi 7.006 (44,6 persen) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 8.626 (55 persen) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp16,92 triliun, serta 57 (0,4 persen) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp1,27 triliun.

Dari permasalahan ketidakpatuhan sebanyak 8.626 permasalahan, di antaranya sebanyak 6.088 (70,6 persen) sebesar Rp16,92 triliun merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian sebanyak 4.100 (67,4 persen) permasalahan sebesar Rp3,48 triliun. Kemudian, potensi kerugian sebanyak 775 (12,7 persen) permasalahan sebesar Rp7,43 triliun. Selanjutnya, kekurangan penerimaan sebanyak 1.213 (19,9 persen) permasalahan sebesar Rp6,01 triliun.

Selain itu, terdapat 2.538 (29,4 persen) permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi.

Dari 57 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp1,27 triliun, terdapat 7 (12,3 persen) permasalahan ketidakhematan sebesar Rp222,29 miliar, dan 50 (87,7 persen) permasalahan ketidakefektifan sebesar Rp1,05 triliun.

Dari nilai permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp16,92 triliun, pada saat pemeriksaan pimpinan entitas menindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp852,82 miliar, antara lain pada Kementerian PUPR sebesar Rp68,22 miliar, Kementerian Sosial sebesar Rp51,59 miliar, dan Pemkab Ogan Ilir sebesar Rp19,41 miliar.

Atas permasalahan yang ditemukan, BPK memberikan 26.171 rekomendasi antara lain terkait dengan permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan, pimpinan entitas terkait agar menetapkan dan/atau menarik kerugian, memungut kekurangan penerimaan, dan menyetorkannya ke kas negara/daerah/perusahaan, serta mengupayakan agar potensi kerugian tidak menjadi kerugian.

Kemudian, terkait dengan permasalahan belum disepakatinya perjanjian konsesi jasa kebandarudaraan, Menteri Perhubungan agar memproses persetujuan atas hasil pembahasan perjanjian konsesi jasa kebandarudaraan dengan PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II sejak tahun 2018.

Terkait dengan permasalahan pelaksanaan kebijakan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF), Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah antara lain agar memerintahkan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk menyelaraskan pengaturan penetapan batas saldo kas daerah serta melakukan evaluasi dan perbaikan/penghitungan kembali atas formulasi penghitungan serta penggunaan data yang valid untuk penyaluran DBH/Dana Alokasi Umum (DAU) melalui fasilitas TDF.

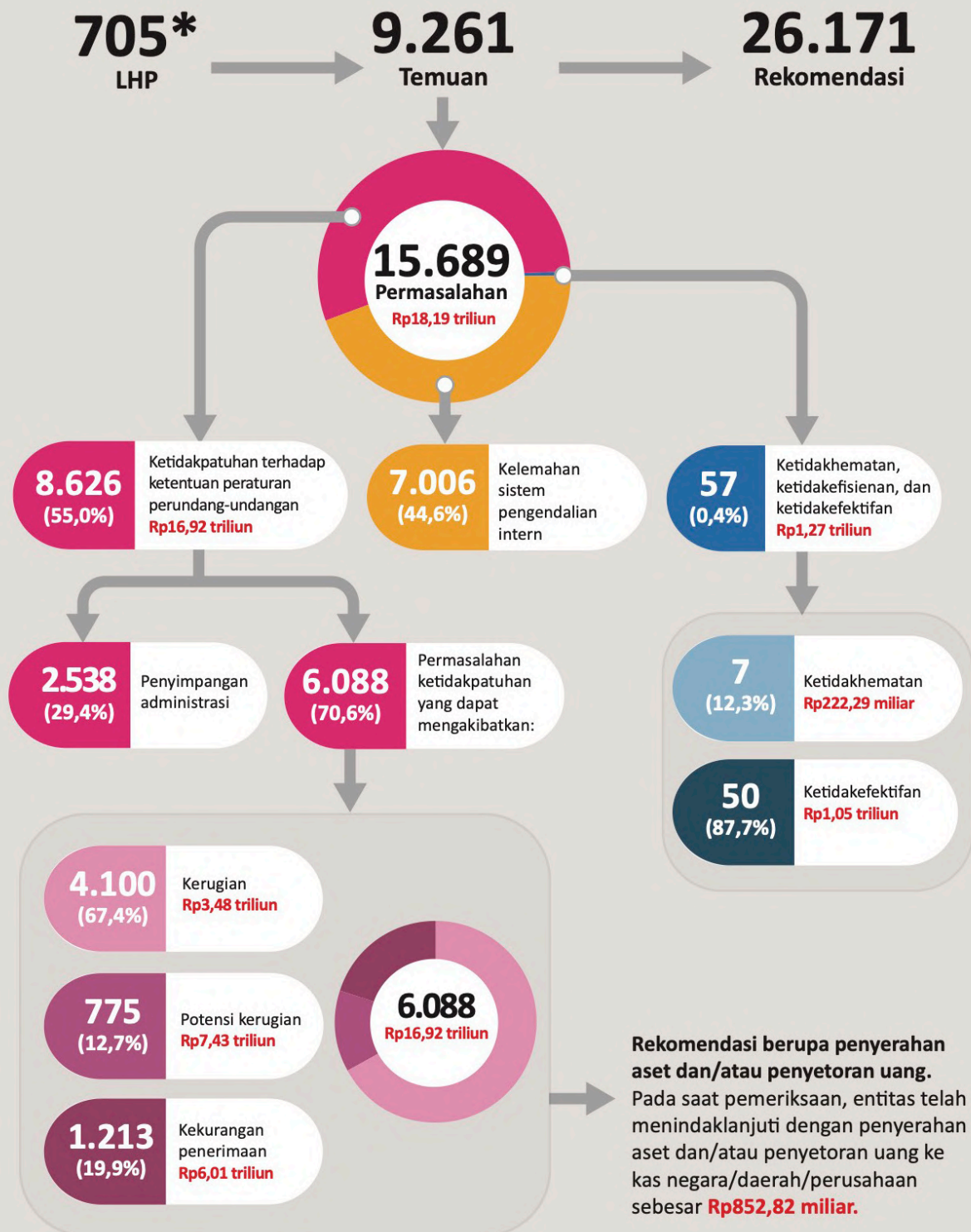
Terkait dengan permasalahan penyajian aset tetap pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G, Menteri Komunikasi dan Informatika agar (1) mengkaji pelaksanaan program penyediaan BTS 4G agar dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menghindari risiko pekerjaan tidak dilanjutkan; (2) meminta penyedia menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak; dan (3) menginstruksikan Dirut BAKTI untuk (a) menyusun ketentuan pembayaran penyediaan BTS 4G sesuai dengan realisasi fisik pekerjaan; dan (b) menyajikan hasil penyediaan BTS 4G secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dengan melaksanakan rekomendasi BPK, diharapkan pengendalian intern yang dilakukan pemerintah/perusahaan menjadi semakin efektif, program/kegiatan dapat dilaksanakan secara lebih ekonomis, efektif, dan efisien, kerugian segera dapat dipulihkan/dicegah, serta penerimaan negara/daerah/perusahaan dapat ditingkatkan. Dengan demikian, tata kelola keuangan negara dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih berkualitas dan bermanfaat untuk mewujudkan tujuan bernegara.



” Dengan melaksanakan rekomendasi BPK, diharapkan pengendalian intern yang dilakukan pemerintah/perusahaan menjadi semakin efektif, program/kegiatan dapat dilaksanakan secara lebih ekonomis, efektif, dan efisien, kerugian segera dapat dipulihkan/dicegah, serta penerimaan negara/daerah/perusahaan dapat ditingkatkan.

HASIL PEMERIKSAAN BPK SEMESTER I TAHUN 2023



*Jumlah tersebut tidak termasuk hasil pemeriksaan atas bantuan keuangan partai politik dari APBN/APBD dan hasil pemeriksaan investigatif.

CAPAIAN OPINI

BPK mengungkapkan, capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) LKKL Tahun 2022 sebesar 99 persen telah melampaui target RPJMN 2020-2024 sebesar 93 persen. Hasil pemeriksaan BPK atas 81 LKKL dan 1 LKBUN Tahun 2022 mengungkapkan opini WTP atas 80 LKKL dan 1 LKBUN serta opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 1 LKKL.

Hasil pemeriksaan tersebut tidak termasuk LK BPK Tahun 2022 yang diperiksa oleh KAP Wisnu Karsono Soewito dan Rekan. LK BPK Tahun 2022 memperoleh opini WTP. Secara keseluruhan, pada tahun 2022 kementerian/lembaga (K/L) yang memperoleh opini WTP sebanyak 81 K/L dan 1 LKBUN (99 persen), serta opini WDP sebanyak 1 K/L (1 persen).

Capaian opini WTP merupakan hasil usaha pemerintah dan kontribusi BPK dalam mendorong terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) ke-16 terutama target 16.6-mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya kenaikan opini LKKL Tahun 2022 dari opini WDP menjadi WTP pada 2 K/L yaitu Kementerian Perdagangan dan Kementerian Ketenagakerjaan. Sementara itu, penurunan opini dari WTP menjadi WDP terjadi pada 1 K/L yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

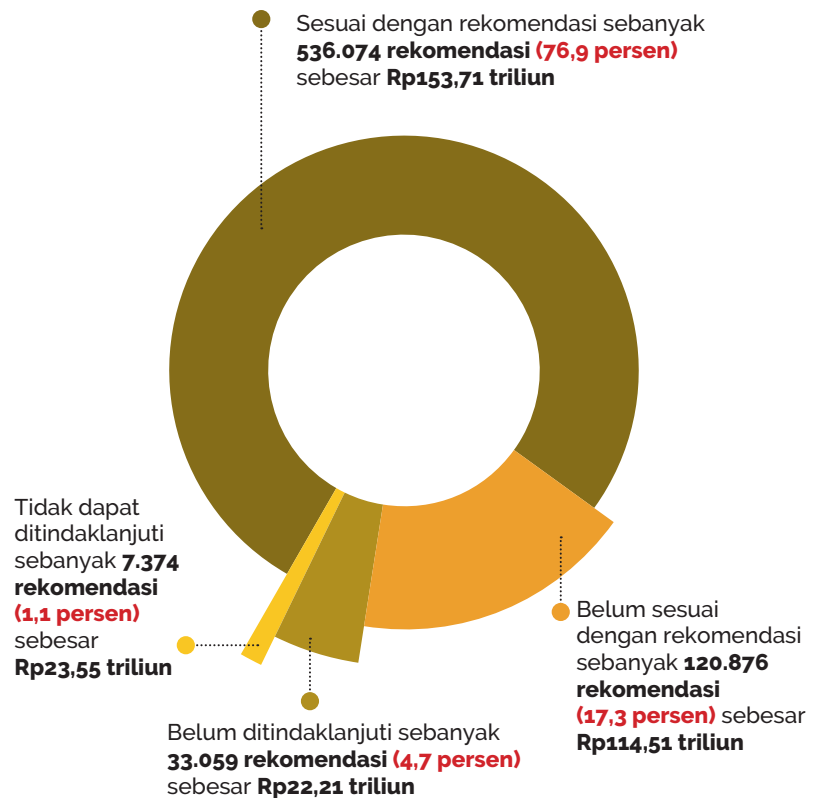
IHPS I Tahun 2023 memuat hasil pemeriksaan atas 542 (100 persen) LKPD Tahun 2022 dari 542 pemerintah daerah yang wajib menyusun laporan keuangan tahun 2022. Terhadap 542 LKPD Tahun 2022 tersebut, BPK memberikan 496 opini WTP (91 persen), 41 opini WDP (8 persen), dan 5 opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) (1 persen).

Berdasarkan tingkat pemerintahan, opini WTP dicapai 32 dari 34 pemerintah provinsi (94 persen), 379 dari 415 pemerintah kabupaten (91 persen), dan 85 dari 93 pemerintah kota (91 persen). Apabila dibandingkan dengan tahun 2021, berdasarkan tingkat pemerintahan, terjadi penurunan opini LKPD Tahun 2022 pada pemerintah provinsi (pemprov) dari 34 (100 persen) menjadi 32 (94 persen) LKPD dan pada pemerintah kota (pemkot) dari 89 (96 persen) menjadi 85 (91 persen) LKPD.

Peran BPK khususnya melalui pemberian rekomendasi dan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut perlu ditingkatkan untuk mendorong capaian opini WTP. Hal ini juga merupakan upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-16, terutama target 16.6-mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

IHPS I Tahun 2023 memuat hasil pemantauan pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) per semester I 2023 atas LHP yang diterbitkan periode 2005-semester I 2023. Pada periode 2005-semester I 2023, BPK telah menyampaikan 697,383 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp313,98 triliun, dengan status tindak lanjut sebagai berikut.



Sumber: IHPS I Tahun 2023

Secara kumulatif sampai dengan semester I 2023, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-semester I 2023 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp132,69 triliun, di antaranya sebesar Rp19,20 triliun atas hasil pemeriksaan periode RPJMN (2020-semester I 2023). ~

BPK Sampaikan 25 Pemeriksaan Investigatif dengan Indikasi Kerugian Rp31,55 Triliun

BPK JUGA TELAH MELAKSANAKAN PKA ATAS 362 KASUS PADA TAHAP PERSIDANGAN.

I khtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2023 memuat hasil pemantauan sampai dengan semester I 2023 atas pemanfaatan laporan hasil pemeriksaan investigatif (PI) dan pemeriksaan kerugian negara (PKN) serta pemberian keterangan ahli (PKA) yang diterbitkan periode 2017-semester I 2023. Pemantauan dilakukan terhadap pemanfaatan laporan hasil PI dalam proses penyidikan dan penyelidikan, pemanfaatan laporan hasil PKN dalam penyusunan P-21 (berkas penyidikan sudah lengkap) dan proses penyidikan, serta PKA yang dihadiri BPK untuk digunakan dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Pada periode 2017-semester I 2023, BPK menyampaikan 25 laporan hasil PI dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah sebesar Rp31,55 triliun dan 363 laporan hasil PKN dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp58,62 triliun kepada instansi yang berwenang. BPK juga telah melaksanakan PKA atas 362 kasus pada tahap persidangan.

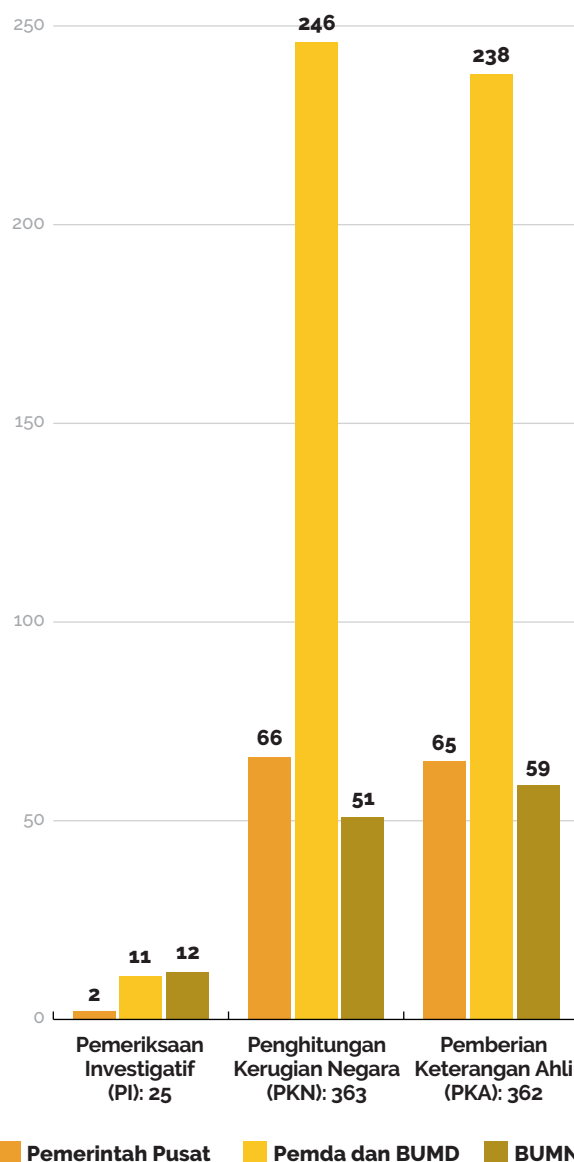
BPK mengungkapkan, dari 25 laporan hasil PI yang sudah disampaikan, 8 laporan telah dimanfaatkan dalam proses penyelidikan dan 17 laporan dimanfaatkan dalam proses penyidikan. Sebanyak dua laporan PI dilaksanakan pada pemerintah pusat, 11 laporan pada pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan 12 laporan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kemudian, dari 363 laporan hasil PKN yang telah disampaikan, 56 laporan sudah dimanfaatkan dalam proses penyidikan dan 307 kasus sudah dinyatakan P-21 (berkas penyidikan sudah lengkap). Dari laporan tersebut, sebanyak 66 PKN dilaksanakan pada pemerintah pusat, 246 PKN pada pemerintah daerah dan BUMD, serta 51 PKN pada BUMN.

Selain itu, untuk 362 pemberian keterangan ahli di persidangan seluruhnya digunakan dalam tuntutan oleh JPU. Secara lebih detail, sebanyak 65 PKA dilakukan pada tingkat pemerintah pusat, 238 PKA pada pemerintah daerah dan BUMD, dan 59 PKA pada BUMN. ~

Pemanfaatan Laporan Hasil PI, PKN, dan PKA

PERIODE 2017-SEMESTER I 2023



Sumber: IHPS I Tahun 2023



Museum BPK RI

Menghadirkan koleksi sejarah seputar BPK

**TERBUKA
UNTUK
UMUM
GRATIS!**



Alamat:

Jl. Diponegoro
No 1, Magelang



Buka:

Selasa - Minggu
09:00-15:00



(0293) 310230



museum.bpk.go.id



[museum_bpcri](https://www.instagram.com/museum_bpcri)

Wisata edukasi
di berbagai ruangan menarik



www.bpk.go.id



[@bpkrioofficial](https://www.instagram.com/bpkrioofficial)



[@bpkri](https://twitter.com/bpkri)



08111907010



BPK RI Official



[@humasbpcri.official](https://www.facebook.com/humasbpcri.official)



[@bpk.ri](https://www.tiktok.com/@bpk.ri)

Mencegah Kecurangan pada Laporan Keuangan

FRAUD

SELAIN SANKSI ADMINISTRATIF, PELANGGARAN TERHADAP PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DI LAPORAN KEUANGAN BISA JUGA MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN PIDANA.



Salah satu fungsi dan tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal. Hal ini bertujuan mewujudkan terciptanya pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

Kepala Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik OJK Novira Indrianingrum mengatakan, untuk mewujudkan tujuan tersebut, Undang-Undang Pasar Modal mewajibkan pasar modal menganut suatu prinsip yang dikenal dengan prinsip keterbukaan.

"Oleh karena itu, ada emiten sebagai perusahaan yang melakukan penawaran umum dan perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagai perusahaan publik. Jadi ada dua, emiten dan perusahaan publik, itu wajib mematuhi prinsip keterbukaan itu tadi," ucap dia dalam Webinar "Pencegahan dan Deteksi Fraud dalam Laporan Keuangan: Perspektif Manajemen, Auditor, Regulator, dan Praktisi Hukum", akhir November 2023.

Untuk mewujudkan prinsip keterbukaan tersebut adalah dengan menyampaikan laporan-laporan yang diwajibkan, terdiri atas laporan berkala, seperti laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan isidentil. Khusus untuk laporan keuangan, emiten dan perusahaan terbuka menyampaikan dalam bentuk *extensible business reporting language*.

Ada beberapa mekanisme penelaahan laporan keuangan. Pertama, tim pengawas OJK akan memantau penyampaian dan pengumuman laporan keuangan (*monitor*). Pemeriksa akan melihat dulu soal tepat waktunya laporan keuangan.

Pemeriksa juga akan memeriksa pengumumannya dalam laporan tersebut. Pemeriksa juga menelaah kesesuaian penyajian dan pengungkapan laporan keuangan (*review*) baik dengan standar akuntansi keuangan maupun dengan peraturan-peraturan OJK.

Maksud dan Tujuan Penelaahan Laporan Keuangan

1 Menelaah Kesesuaian Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan dengan Peraturan Perundangan dan Standar Akuntansi Keuangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik

Standar Akuntansi Keuangan

Pasal 69

(1) Laporan keuangan yang disampaikan kepada Baepam wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

(2) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Baepam dapat menentukan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal.

Maksud dan Tujuan Penelaahan Laporan Keuangan

2 Menelaah Pemenuhan Peraturan OJK Lainnya, antara lain:

POJK No. 30/POJK.04/2015 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	POJK No. 31/POJK.04/2015 Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik	POJK No. 17/POJK.04/2020 Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha	POJK No. 42/POJK.04/2015 Transaksi Afiliasi dan Transaksi Bertujuan Kepentingan
POJK No. 75/POJK.04/2017 Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan	POJK No. 55/POJK.04/2015 Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit	POJK No. 11/POJK.04/2017 Laporan Kepemilikan atau Seting Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Tbk	POJK No. 30/POJK.04/2017 Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Tbk

Jadi tergantung, karena pelanggaran terhadap penyajian laporan keuangan ini, bisa merupakan pelanggaran administratif, bisa juga merupakan pelanggaran pidana yang bisa berujung pada penyidikan.

Kemudian, pemeriksa menelaah (menganalisis) ke angka dan akun-akun yang ada di laporan keuangan. Pemeriksa juga akan menyusun tanggapan atau permintaan atas temuan-temuan penelaahan yang dilakukan oleh tim pengawas.

Setelah menerima jawaban dari emiten atau perusahaan publik, pemeriksa akan mereviu jawaban apabila masih dipandang perlu untuk diminta penjelasan lebih lanjut maka akan melakukan hal tersebut.

TINDAK LANJUT PENGAWASAN

Terkait dengan POJK 23 Tahun 2001 tentang Tindak Lanjut Pengawasan di bidang Pasar Modal, apabila pengawas OJK menemui suatu dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundangan di bidang pasar modal, hal pertama yang dilakukan adalah memberikan perintah tindakan tertentu. Kemudian, diberikan jangka waktu dan apabila tidak dilakukan maka OJK berwenang memberikan perintah tertulis. Bisa juga, ucap dia, di saat yang bersamaan OJK bisa langsung melakukan proses penegakan hukum yang berujung pada pemberian sanksi administratif atau penyidikan.

Mekanisme Penelaahan Laporan Keuangan

* Temuan/tanggapan belum tentu merupakan indikasi pelanggaran

Tindak Lanjut Pengawasan OJK atas Pelanggaran

POJK No. 23/POJK.04/2001 tentang Tindak Lanjut Pengawasan di Bidang Pasar Modal

Jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, OJK berwenang untuk:

- Memberikan Perintah Tindakan Tertentu,
- Memberikan Perintah Tertulis, dan/atau
- Melakukan proses penegakan hukum, yaitu administratif, penyidikan

Contoh Temuan terkait Aset

TEMUAN

- Kesalahan pencatatan dan pengungkapan Piutang Usaha/Piutang Lain-lain dengan pihak berelasi, namun dicatat sebagai pihak ketiga
- Transaksi pemberian Piutang Lain-lain kepada Pihak Afiliasi tidak memenuhi prosedur POJK 42/2020
- Amortisasi biaya dibayar dimuka tidak memenuhi konsep penandingan biaya dengan penghasilan (matching cost against revenue)
- Saldo Uang muka/Piutang Lain-lain, atau Kas dan Setara kas dengan nilai signifikan dan relatif tidak berubah setelah beberapa periode
- Saldo Kas dan Setara kas yang tidak mencerminkan jumlah sisa dana Penawaran Umum yang belum digunakan
- Penurunan nilai aset tahun berjalan yang dibebankan pada tahun-tahun sebelumnya
- Penyajian utang dan piutang secara net-off
- Emiten tidak melakukan konsolidasi atas laporan keuangan entitas yang memenuhi ketentuan pengendalian sebagaimana PSAK 65
- Perbedaan pencatatan goodwill antara di Prospektus (menggunakan PSAK 38), seharusnya menggunakan PSAK 22
- Pengakuan Beban Tanggahan (Biaya Dibayar Dimuka) atas biaya iklan dan promosi yang telah dilaksanakan
- Rekayasa Piutang Macet yang dicatat sebagai Piutang Lancar

"Jadi tergantung, karena pelanggaran terhadap penyajian laporan keuangan ini, bisa merupakan pelanggaran administratif, bisa juga merupakan pelanggaran pidana yang bisa berujung pada penyidikan," tutur dia.

Khusus untuk pelanggarannya sendiri, selain pelanggaran administratif, pelanggaran terhadap penyajian dan pengungkapan di laporan keuangan bisa juga merupakan suatu pelanggaran pidana. Terkait hal itu diatur dalam UU Pasar Modal yang sudah di amandemen di UU No 4 Tahun 2023 tentang P2SK.

"Ini dua pasal untuk pelanggaran yang pada umumnya digunakan atas pelanggaran *fraud* di laporan keuangan. Banyak pasal-pasal yang lain yang terkait dengan *insider trading*, manipulasi pasar, itu semua pasal pidana. Tapi yang terkait dengan pelaporan keuangan, pada umumnya dua pasal ini,"ucap dia. ~



Laboratorium Forensik Digital BPK berhasil mendapatkan sertifikasi akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional atas kompetensinya sebagai laboratorium pengujian dengan menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017) sebagai persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi



www.bpk.go.id



[@bpkriofficial](https://www.instagram.com/bpkriofficial)



[@bpkri](https://twitter.com/bpkri)



08111907010



BPK RI Official



[@humasbpkri.official](https://www.facebook.com/humasbpkri.official)



[@bpk.ri](https://www.tiktok.com/@bpk.ri)

BPK Bertekad Kembali Menjadi Auditor Eksternal IMO

DENGAN KAPASITAS DAN PENGALAMAN YANG DIMILIKI, ISMA YATUN OPTIMISTIS BPK AKAN DAPAT TERUS MEMBERIKAN PEMERIKSAAN YANG BERKUALITAS DAN BERMANFAAT TERHADAP IMO.



■ Ketua BPK, Isma Yatun

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun meminta dukungan dari para duta besar (dubes) negara sahabat untuk kembali menjadi auditor eksternal International Maritime Organization (IMO) pada periode 2024-2027. Dengan kapasitas dan pengalaman yang dimiliki, Isma Yatun optimistis BPK akan dapat terus memberikan pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat terhadap IMO.

Hal tersebut disampaikan Ketua BPK saat menghadiri pertemuan yang digelar Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan para dubes di Jakarta, Senin (6/11/2023). Kegiatan itu digelar Kemenhub untuk meminta dukungan atas pencalonan Indonesia untuk menjadi anggota dewan IMO.

Isma Yatun dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi karena telah diundang untuk menghadiri pertemuan tersebut. Isma menjelaskan, BPK telah mendukung IMO dengan memberikan audit kualitas tertinggi selama menjadi auditor eksternal organisasi tersebut pada 2020-2023.



Pengalaman BPK yang luas dalam mengaudit organisasi internasional, termasuk IMO dan IAEA, mencerminkan kemampuan kami untuk memberikan audit berkualitas tinggi kepada IMO.

Isma menjelaskan, pencapaian BPK sebagai auditor eksternal didukung oleh mandat independen yang dimiliki BPK, serta sumber daya auditor profesional yang sangat terampil dan berpengalaman di bidang audit, baik di tingkat nasional maupun internasional.

"Selama masa jabatan kami (sebagai auditor eksternal IMO), BPK telah memberikan nilai tambah audit kepada IMO. Audit BPK telah membantu IMO meningkatkan keandalan dan keadilan dalam laporan keuangan mereka. Juga membantu IMO meningkatkan pengendalian internal dan kepatuhan serta efisiensi dan efektivitas tata kelola," kata Isma.

Isma menambahkan, hasil audit BPK juga memberikan manfaat bagi anggota IMO mengenai independensi pembangunan dan tata kelola IMO. Hal itu bisa dicapai berkat masukan, pandangan, kesimpulan, serta rekomendasi yang disampaikan BPK dari hasil pemeriksaan.

"Pengalaman BPK yang luas dalam mengaudit organisasi internasional, termasuk IMO dan IAEA, mencerminkan kemampuan kami untuk memberikan audit berkualitas tinggi kepada IMO."

Dalam kesempatan itu, Isma Yatun menekankan bahwa BPK bertekad untuk melanjutkan pelayanan pemeriksaan di IMO untuk periode kedua tahun 2024-2027 karena masa jabatan BPK sebagai auditor eksternal akan berakhir pada tahun ini.

"Oleh karena itu, atas nama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, saya dengan rendah hati mengucapkan terima kasih atas dukungan yang tiada henti terhadap BPK untuk menjadi Auditor Eksternal IMO periode 2024-2027," kata Isma.

Pertemuan yang digelar Kemenhub dihadiri sejumlah Dubes dan perwakilan dari 23 negara, di antaranya dari Zimbabwe, Papua New Guinea, Libya, Iran, Myanmar, Belarus, Hungaria, Thailand, Colombia, Republik Ceko, Irlandia, Austria, Suriname, Bosnia Herzegovina, Bahrain, Maroko, Pakistan, Kamboja, Denmark, Korea, Inggris, dan Irak.



■ Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi

"Kami mohon dukungan terbaik pada pencalonan Indonesia menjadi anggota dewan IMO. Kami terus berkomitmen memperkuat peran IMO dan mengembangkan sektor maritim global yang berkelanjutan melalui upaya inisiatif, dedikasi, dan tindakan nyata yang konsisten," ujar Menhub Budi Karya Sumadi seperti dikutip dari laman resmi Kemenhub.

Di depan para Dubes negara sahabat, Menhub menyampaikan peran aktif Indonesia sebagai negara anggota IMO sejak 1961. "Kami bekerja sama dengan negara maritim lainnya telah secara aktif menerapkan standar global keselamatan dan keamanan pelayaran, perlindungan lingkungan laut, kompetensi, dan hak-hak dasar pelaut," imbuhnya.

Menhub juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus mendorong penguatan kerja sama dalam penerapan efisiensi energi dan energi terbarukan untuk mempercepat pengurangan emisi gas rumah kaca dari kapal.

"Kami menyambut partisipasi dan praktik terbaik negara-negara anggota IMO dalam mengembangkan pelabuhan yang cerdas dan berkelanjutan serta meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan industri maritim," kata Menhub. ~

BPK Paparkan Arti Penting Keterlibatan Indonesia di IMO

SELAIN BERHUBUNGAN DENGAN MASALAH-MASALAH KEMARITIMAN, TERUTAMA PELAYARAN INTERNASIONAL, ISU TERSEBUT JUGA RELEVAN DENGAN KESELAMATAN, KEAMANAN, DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN BAGI INDUSTRI PELAYARAN INTERNASIONAL.

Peran dan keterlibatan aktif Indonesia di International Maritime Organization (IMO) memiliki arti penting dan strategis. Baik sebagai anggota dewan maupun auditor eksternal. Hal ini terutama dalam menentukan arah dan kebijakan penyusunan aturan maritim internasional yang juga berpengaruh terhadap kebijakan maritim nasional.

"Dalam menjalankan peran aktifnya tersebut Indonesia juga mengikuti perkembangan dan isu terkini yang menjadi perhatian dan dibahas dalam pertemuan IMO," kata Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/ Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana saat menyampaikan *keynote speech* di *focus group discussion* (FGD) tentang "Peran dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Maritim Dunia" di Kementerian Perhubungan, Jumat (3/11/2023).

Dia menjelaskan, selain berhubungan dengan masalah-masalah kemaritiman, terutama pelayaran internasional, isu tersebut juga relevan dengan keselamatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan bagi industri pelayaran internasional. Permasalahan tersebut memerlukan tindak lanjut dan koordinasi di dalam negeri.

Tak hanya itu, juga dapat berdampak pada peran dan kebijakan terkait di level nasional yang relevan dengan fungsi kementerian. Kementerian dimaksud terutama adalah Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Hubla) yang menjadi administrator maritim IMO di Indonesia.



■ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/ Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana

Dalam paparannya, Nyoman juga menggarisbawahi amanat Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia di Organisasi Internasional. Dia menjelaskan mengenai tujuan dari *beleid* tersebut.

Terutama peningkatan peran dan kinerja Indonesia di forum internasional. Kemudian menjalin dan mengelola hubungan baik antarnegara serta membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat internasional terhadap wibawa dan kehormatan bangsa Indonesia.



Dalam kesempatan tersebut, Nyoman juga menyampaikan apresiasi atas dibentuknya Forum Komunikasi Maritim Internasional (Forkomarin) pada 17 Oktober 2023 oleh Kementerian Perhubungan yang turut hadir dalam FGD. Forum tersebut pun diharapkan dapat menjadi wadah komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan guna menunjang peran serta Indonesia dalam berbagai organisasi kemaritiman internasional.

FGD diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan yang dilatarbelakangi dari hasil pemeriksaan kinerja yang dilakukan BPK terhadap IMO. FGD ini bertujuan untuk meningkatkan dampak hasil pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. Terutama mengenai fungsi kementerian serta kebijakan level nasional terkait.

Hal ini untuk perbaikan tata kelola sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Strategis BPK 2020-2024. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi membuka FGD yang dihadiri oleh berbagai unsur terkait yang menjadi *stakeholder* kemaritiman di tingkat nasional. Terutama unsur pemerintahan, asosiasi seperti Indonesian National Shipowner's Association (INSA), dan unsur akademisi.

FGD menghadirkan tiga isu penting yang dilatarbelakangi dari hasil pemeriksaan kinerja BPK terhadap IMO tahun 2021 dan 2022. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi yang dimoderatori oleh Capt. Hadi Supriyono dari unsur akademisi.

Isu pertama terkait "Peningkatan Keselamatan Maritim dan Pencegahan Kecurangan dalam Dunia Maritim melalui Skema Nomor Identifikasi Kapal IMO" disampaikan oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Dr Hartanto.



Dalam paparan, disampaikan tentang manfaat, tantangan serta *lesson learned* dari skema tersebut. Pada sesi ini juga didiskusikan peluang pendaftaran nomor kapal secara berbayar kepada IMO.

Materi selanjutnya mengenai "Strengthening Indonesia's Diplomacy through Indonesians' Employment in International Organization" disampaikan oleh Sekretaris Ditjen Hubla, Lollan Andy Sutomo Panjaitan. Adanya kebutuhan untuk menempatkan orang Indonesia di organisasi internasional, termasuk skema *junior professionals officer* (JPO) dan *senior professionals officer* (SPO) yang dapat dimanfaatkan di IMO, juga diulas dalam sesi ini.

Materi terakhir, "Peningkatan Peran dan Kontribusi Indonesia pada Proyek Jangka Panjang yang Mendukung Tujuan Kerja Sama Teknis IMO" disampaikan oleh Kasubdit Keselamatan Kapal, Wahyu Ardianto. Pemateri menyampaikan keterlibatan aktif Indonesia dalam beberapa proyek kerja sama teknis IMO. Proyek yang diikuti Indonesia antara lain, perlindungan biodiversitas laut melalui proyek *Glofouling*, pengelolaan sampah di laut melalui proyek *Glolitter*, *blue solution project*, dan upaya penurunan gas rumah kaca. ~

BPK Dipercaya Sebagai Sekretariat ASEANSAI Periode 2024-2029

SEBAGAI SEKRETARIAT ASEANSAI,
BPK BERPERAN SEBAGAI PENGGERAK (*DRIVING FORCE*)
UNTUK MEMASTIKAN KEGIATAN YANG DIRENCANAKAN BERJALAN DENGAN BAIK.



Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan lebih terbuka untuk bekerja sama dengan anggota ASEANSAI pada masa mendatang. Hal ini terkait dengan fungsi BPK dalam menjalankan kesekretariatan ASEANSAI untuk periode 2024-2029.

"Di tengah tantangan yang dinamis BPK juga akan lebih mendorong inklusivitas dengan lebih *agile* dan terbuka untuk bekerja sama dengan anggota ASEANSAI

dalam menjalankan kesekretariatan," kata Ketua BPK Isma Yatun di the 7th ASEANSAI Summit yang diselenggarakan di Manila, Filipina (2/11/2023).

Pada kesempatan itu, BPK dipercaya mengemban tanggung jawab sebagai sekretariat organisasi lembaga pemeriksa negara-negara anggota ASEAN (ASEANSAI) periode 2024-2029. Sebelumnya, BPK telah menjalankan perannya sebagai sekretariat ASEANSAI sejak pembentukan ASEANSAI pada 2011.



Di tengah tantangan yang dinamis BPK juga akan lebih mendorong inklusivitas dengan lebih *agile* dan terbuka untuk bekerja sama dengan anggota ASEANSAI dalam menjalankan kesekretariatan.

Sebagai sekretariat ASEANSAI, BPK berperan sebagai penggerak (*driving force*) untuk memastikan kegiatan yang direncanakan berjalan dengan baik. Selain itu, sekretariat ASEANSAI juga bertanggung jawab mengelola kesekretariatan dan pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan ASEANSAI. Termasuk berperan dalam pengembangan kerja sama ASEANSAI dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Dalam penetapan yang dilakukan di *summit* tersebut, hadir para ketua lembaga pemeriksa (*supreme audit institutions/SAI*) dari negara-negara anggota ASEAN yang memberikan persetujuan atas penetapan isu strategis. Misalnya saja, pergantian keketuaan ASEANSAI, penetapan revisi *rules and procedures*, ketua komite dan anggotanya serta auditor ASEANSAI, dan penunjukan Sekretariat ASEANSAI.

Ketua BPK Isma Yatun dalam sambutannya, menyampaikan apresiasi kepada para ketua SAI atas kepercayaan yang diberikan. Disampaikan juga bahwa ke depan, BPK akan mendorong kerja sama dengan mitra strategis, seperti organisasi regional dan *development partners*, serta mendorong *internal governance* yang lebih baik. ~



Ketua BPK dan Dubes Australia Sepakat Soal Kesempatan untuk Perempuan

DUTA BESAR AUSTRALIA MENYAMPAIKAN SELAMAT ATAS BERBAGAI PENCAPAIAN DAN KONTRIBUSI BPK DALAM BERBAGAI HAL, TERUTAMA PERAN BPK DI DUNIA INTERNASIONAL.



Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun dan Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny William PSM menekankan pentingnya program kerja sama yang memberikan kesempatan lebih luas kepada perempuan. Hal ini antara lain diselenggarakan melalui program *women in leadership mentoring* dan program *women with children secondment*.

Hal ini disampaikan keduanya pada saat Ketua BPK menerima Duta Besar Australia dalam *courtesy meeting* di kantor pusat BPK, di Jakarta, Jumat (10/11/2023). Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia. Secara khusus, antara BPK dan lembaga pemeriksa Australia atau the Australian National Audit Office (ANAO).

Dalam kesempatan tersebut, Isma mengapresiasi dukungan Pemerintah Australia melalui berbagai program yang diinisiasi oleh DFAT Australia.

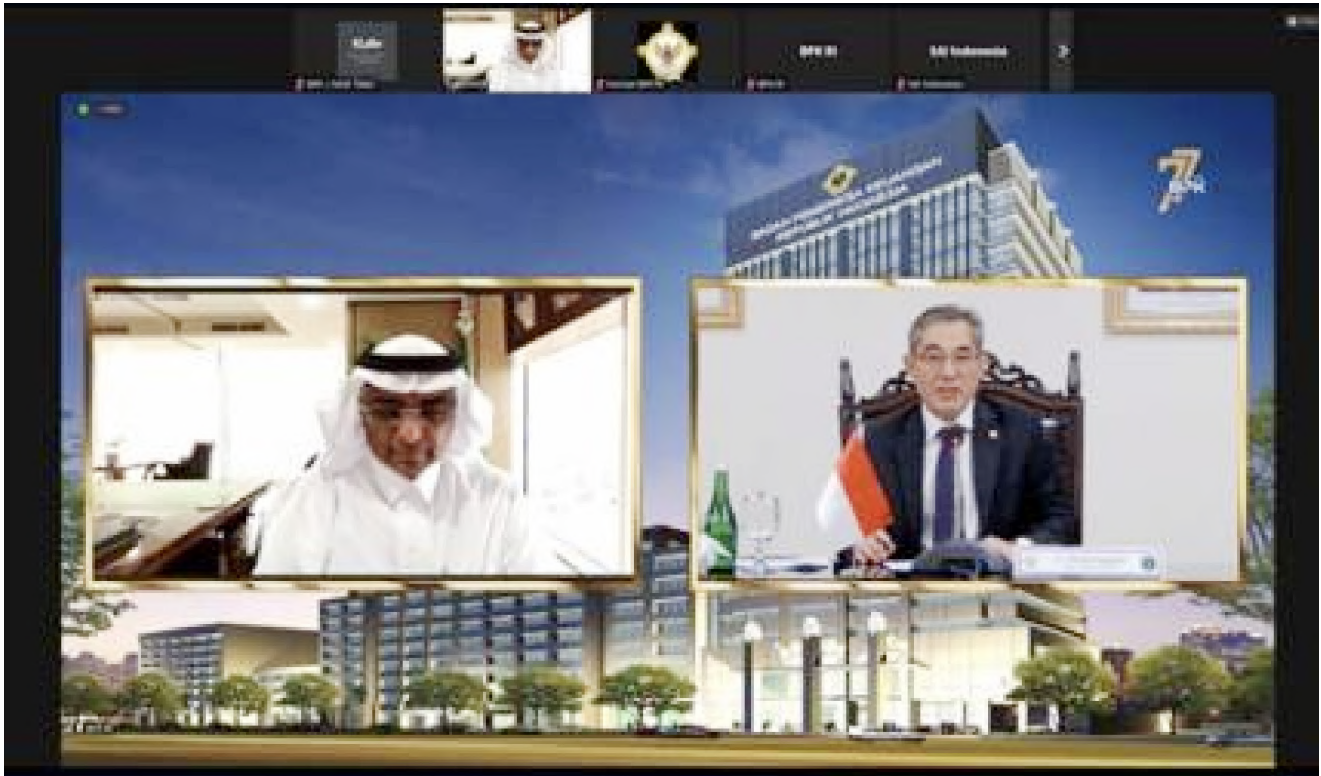
Secara khusus yaitu program Prospera yang menjadi payung kerja sama bilateral antara BPK dan ANAO.

Kerja sama antara BPK dan ANAO telah berlangsung sejak 2006 dan telah berkembang semakin matang. Dengan perubahan fokus dari pelatihan level teknis menjadi fokus pada manajemen, pengembangan organisasi, dan *two way learning* antarinstansi dalam beragam topik. Baik kelembagaan maupun teknis pemeriksaan.

Selain itu, Duta Besar Australia menyampaikan selamat atas berbagai pencapaian dan kontribusi BPK dalam berbagai hal. Terutama peran BPK di dunia internasional.

Di akhir pertemuan, kedua pihak sepakat mendukung peningkatan kerja sama dan kolaborasi yang semakin kokoh dan berkelanjutan. Baik antara BPK dan ANAO maupun Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia pada masa yang akan datang. ~





BPK Berbagi Pengetahuan dan Pengalaman dengan SAI Arab Saudi

DALAM SAMBUTANNYA, WAKIL KETUA BPK JUGA MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH ATAS DUKUNGAN SAI ARAB SAUDI UNTUK PENCALONAN BPK SEBAGAI TUAN RUMAH KONGRES ORGANISASI LEMBAGA PEMERIKSA TERTINGGI INTERNASIONAL (INTOSAI) 2028.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerukan pentingnya kerja sama dan kolaborasi dengan General Court of Audit of the Kingdom of Saudi Arabia. Hal ini dalam bentuk berbagi pengetahuan dan pengalaman antara kedua lembaga pemeriksa. Khususnya dalam bidang pemeriksaan kinerja dan peran lembaga pemeriksa dalam proses transisi dari akuntansi berbasis kas menuju akrual.

Seruan itu disampaikan Wakil Ketua BPK Hendra Susanto yang memimpin delegasi dalam pertemuan

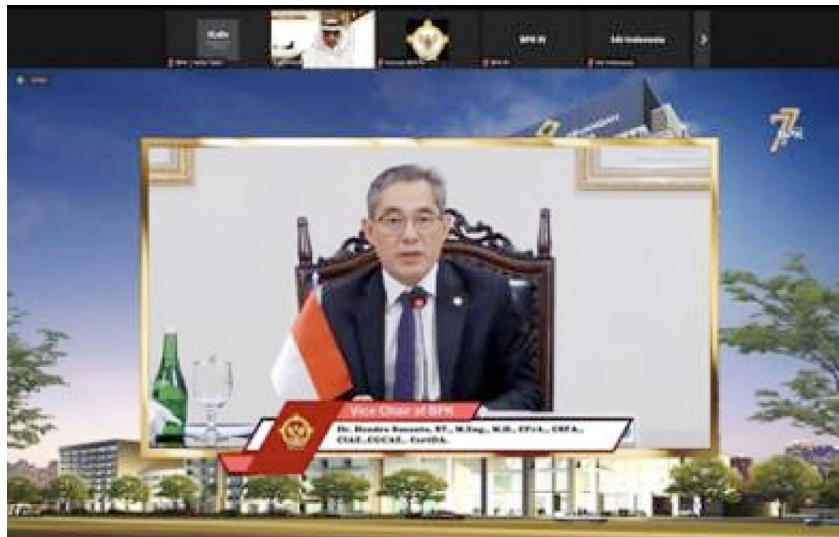
bilateral dengan Executive Vice President for Performance Audit of the General Court of Audit of the Kingdom of Saudi Arabia Abdullah Al Haiqi. Pertemuan diselenggarakan secara daring pada Rabu (15/11/2023).

Pertemuan ini diselenggarakan atas inisiatif lembaga pemeriksa atau SAI Arab Saudi. Tujuannya, agar BPK dapat membagikan pengetahuan dan pengalaman mengenai metodologi dan strategi pemeriksaan kinerja. Termasuk peran lembaga pemeriksa dalam proses transisi akuntansi berbasis kas menuju akrual.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua BPK juga menyampaikan terima kasih atas dukungan SAI Arab Saudi untuk pencalonan BPK sebagai tuan rumah Kongres Organisasi Lembaga Pemeriksa Tertinggi Internasional (INTOSAI) 2028.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) BPK Bahtiar Arif mempresentasikan mengenai peran BPK dalam proses transisi dari akuntansi berbasis kas ke akuntansi berbasis akrual di Indonesia. Presentasi mencakup landasan hukum, proses peralihan secara kronologis dari tahun ke tahun, tantangan yang dihadapi, dan pelajaran yang dipetik dari transisi akuntansi kas ke akrual.

Selanjutnya, Sekjen BPK juga menyampaikan terkait metodologi dan strategi pemeriksaan kinerja. Baik dalam fase perencanaan, pemeriksaan lapangan, dan pelaporan, termasuk dampak pemeriksaan kinerja.



Pertemuan tersebut, diakhiri dengan penegasan kembali komitmen BPK dan SAI Arab Saudi untuk memperkuat kerja sama bilateral di bidang audit sektor publik. Ini dilakukan dengan mengeksplorasi peluang kerja sama dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas pemeriksaan.

Sebagai tindak lanjut pertemuan ini, Wakil Ketua BPK menyambut baik rencana SAI Arab Saudi untuk berkunjung ke Indonesia guna memperdalam pembahasan mengenai kedua topik dimaksud. Termasuk juga berdiskusi topik-topik lainnya, seperti mengenai topik *cyber security-IT audit* dan mengunjungi Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) BPK. ~





BPK memperoleh penghargaan
Aninditha Wistara Data
dari Badan Pusat Statistik.

Penghargaan ini didapat
atas prestasi baik BPK dalam
Evaluasi Penyelenggaraan
Statistik Sektoral Tahun 2023.



www.bpk.go.id



[@bpkriofficial](https://www.instagram.com/bpkriofficial)



[@bpkri](https://twitter.com/bpkri)



08111907010



BPK RI Official

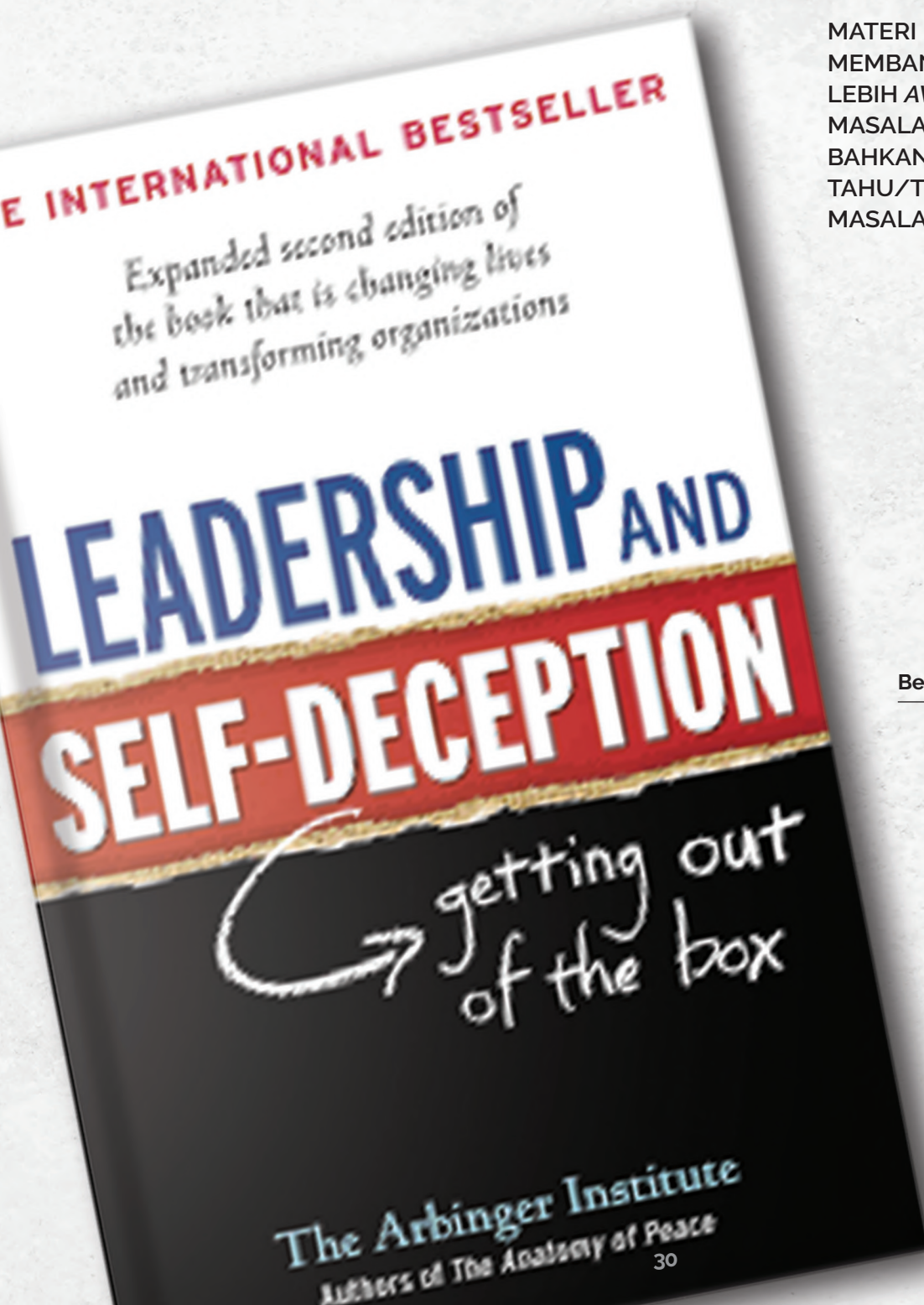


[@humasbpkri.official](https://www.facebook.com/humasbpkri.official)



[@bpk.ri](https://www.tiktok.com/@bpk.ri)

Berpikir dan Memandang *Out of The Box* Lewat Buku *Bagai Novel*



MATERI DALAM BUKU INI DAPAT MEMBANTU PEMBACA MENJADI LEBIH *AWARE* TERHADAP MASALAH YANG SEBELUMNYA BAHKAN PEMBACA TIDAK TAHU/TIDAK SADAR MEMILIKI MASALAH TERSEBUT.

Penulis :
The Arbinger Institute

Penerbit :
Berrett-Koehler Publishers, Inc.

Tahun Terbit :
2000, 2010, 2018

Tebal Halaman :
ix + 221 halaman

ISBN :
9781523097807

Warta Pemeriksa kali ini akan mengangkat salah satu buku yang menjadi *best seller* sepanjang waktu berjudul "Leadership and Self Deception Getting Out of the Box". Alasannya tentu saja karena penerangan materi pada buku ini sangat menarik.

Buku ini memiliki dua tokoh sentral, Tom Callum dan Bud Jefferson. Tom Callum, mendapat pekerjaan untuk posisi *senior manager* pada *line* Perusahaan Zagrum. Bud Jefferson adalah wakil presiden Perusahaan Zagrum.

Cerita berawal pada pertemuan pertama antara kedua tokoh sentral tersebut. Bud Jefferson menyatakan bahwa Tom Callum memiliki masalah dan dia harus keluar dari masalahnya tersebut bila ingin bertahan di Zagrum. Masalahnya adalah Tom Callum bahkan tidak memahami apa masalah yang ada padanya. Ketidapahaman Tom Callum bahwa dirinya memiliki masalah dan bagaimana dia menyelesaikan masalah tersebut merupakan inti dari buku ini.

Bud Jefferson menggiring diskusi/dialog dengan Tom Callum untuk mengenali masalah yang ada padanya, penolakan diri, dan "box" (kotak) tempat Tom Callum berada jika dia terus melakukan penolakan diri atau yang disebut dalam buku ini sebagai *self deception/self betrayal*, kemudian mengapa sampai Tom Callum masuk ("in the box") dan bagaimana dia dapat keluar ("out of the box").

Pada saat Tom Callum sebagai tokoh sentral melakukan *self deception/self betrayal* itulah sebenarnya penyebab dirinya masuk ke dalam "box" dan bahayanya adalah jika seseorang berada di dalam "box", ia akan buta terhadap kebenaran/fakta atas dirinya sendiri dan orang lain.

Semua alur dan fase tahapan dalam buku ini dilalui dengan dialog dari kedua tokoh sentral tersebut. Dalam dialog menarik macam kisah dalam novel, muncul beberapa tokoh terkait kedua tokoh sentral sebagai bagian dari konstruksi yang sangat mendukung keseluruhan cerita, hingga dapat berproses sampai dengan Tom Callum memahami masalah yang ada padanya, dan berhasil keluar dari "box".

Pada akhirnya tersimpulkan bahwa bagi Perusahaan Zagrum yang terpenting untuk dilakukan oleh Tom Callum setelah keberadaannya dalam perusahaan itu adalah bagaimana Tom Callum bisa mengembangkan sistem yang dapat membantu para pegawainya memahami bagaimana mereka masuk ke dalam "box" pada situasi/kondisi/hubungan tim kerja, (tentunya agar mereka dapat menghindarinya), dan sistem yang memastikan mereka untuk tetap berada di luar "box", *stay out of the box*.

Buku ini memiliki beberapa kelebihan mulai dari penerangan materi ke dalam bentuk dialog percakapan antar tokoh. Kemudian keterlibatan tokoh-tokoh di luar tokoh sentral yaitu istri mereka, Nancy, istri Bud Jefferson dan Laura istri Tom Callum, serta Lou Herbert dan Kate Stenarude yang berada di posisi puncak Perusahaan Zagrum, juga sangat membantu menggambarkan dengan jelas maksud penulis untuk mengidentifikasi masalah. Alasan seseorang dalam suatu hubungan terdekat/keluarga ataupun Tim Kerja bisa masuk ke dalam "box" dan bagaimana cara keluar dari "box" tersebut.



Materi yang ada dalam buku ini dituangkan dengan begitu jelas, *to the point*, mudah dipahami, dan sangat menarik untuk dibaca.

Kemudian dalam tiap akhir tahapan dituliskan dengan cantuman yang menarik, seperti poin besar bagai simpulan yang dapat memudahkan pembaca dalam memahami kesimpulan, melekatkan pada pikiran pembaca (berdasarkan proses dialog sepanjang tahapan yang menghasilkan simpulan dimaksud), memudahkan pembaca untuk mencerna dan memahami keseluruhan tahapan untuk dapat berpikir dan memandang *out of the box*.

Materi dalam buku ini dapat membantu pembaca menjadi lebih *aware* terhadap masalah yang sebelumnya bahkan pembaca tidak tahu/tidak sadar memiliki masalah tersebut. Sistematika dalam buku ini begitu mengalir, *to the point* bagian per bagian yang memang merupakan kerangka besar dari tema buku, yaitu *self deception*.

Di luar itu, sebagai sebuah buku tersendiri, buku ini sangat *remarkable*. Materi yang ada dalam buku ini dituangkan dengan begitu jelas, *to the point*, mudah dipahami, dan sangat menarik untuk dibaca. Materinya dapat menaikkan level seseorang dengan mempengaruhi cara berpikir dan memandang masalah, hingga mempengaruhi kinerja dan kualitas hidup baik di lingkungan pekerjaan maupun keluarga. ~



Pengamanan **Password**



Gunakan password yang kuat

Panjang *password* minimal 8 karakter.

Menggunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil dan angka.

Tidak menggunakan kata yang mudah ditebak atau terdapat dalam kamus.

Tidak menggunakan angka atau kata yang bermakna identitas diri
Contoh : tanggal lahir, NIP, nama anak, nama binatang peliharaan, dan sebagainya.

Jaga Keamanan Password

Tidak berbagi *password* dengan orang lain.

Tidak menggunakan *password* yang sama untuk sistem/aplikasi yang berbeda.

Contoh : menggunakan *password* yang berbeda untuk sosmed dan akun BPK.

Tidak menuliskan *password* di kertas/media lain yang terlihat dengan mudah.

Logout dari aplikasi yang sudah tidak digunakan.



www.bpk.go.id



@bpkriofficial



@bpkri



08111907010



BPK RI Official



@humasbpkri.official



@bpk.ri

I-MESSAGE

Model Komunikasi Setara ala Virginia Satir

I-MESSAGE ADALAH BAGIAN DARI KOMUNIKASI INTERPERSONAL YANG MEMFOKUSKAN ATAS APA YANG DIRASAKAN KOMUNIKATOR AKIBAT DARI AKTIVITAS KOMUNIKAN.



Sebagai pegawai Badan Pemeriksa Keuangan tentu saja akan berkomunikasi dengan pihak lain. Baik itu urusan pekerjaan, rapat atau bahkan hanya untuk bersenda gurau saat kita beristirahat.

Hubungan komunikasi tersebut atau disebut komunikasi interpersonal dengan istilah *i-message*. *I-message*, menurut Employee Care Center BPK adalah bagian dari komunikasi interpersonal yang memfokuskan atas apa yang dirasakan komunikator akibat dari aktivitas komunikasi. Dengan begitu komunikasi tidak dalam kondisi dihakimi maupun disalahkan, sehingga komunikasi dengan sukarela mendengarkan komunikator dan memahami apa yang ia katakan.

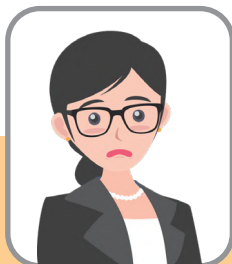
Model komunikasi *i-message* sendiri dipopulerkan pengarang dan psikolog asal Amerika Serikat, Virginia Satir. Tidak hanya dalam komunikasi di

kantor, menurut Virginia, komunikasi interpersonal yang kongruen atau setara sangat esensial keberadaannya dalam keluarga. Agar terwujud, Virginia Satir merekomendasikan konsep *i-message* dari Dr Thomas Gordon.

Konsep *i-message* menerapkan 5 formula yang terdiri dari *Sensing*, *Emotion*, *Want*, *Behaviour*, dan *Effect* (SEWBE) yang menyebabkan interaksi dan komunikasi lebih intensif.

Komunikasi kongruen (utamanya dalam keluarga) adalah komunikasi yang berhasil yaitu komunikasi yang "nyambung". Komunikasi kongruen sendiri bisa efektif terjadi jika terlengkapinya empat elemen: komunikator (diri sendiri), komunikasi (lawan bicara/orang lain), topik, serta konteks. Komunikasi menjadi *incongruent* jika salah satu dari keempat aspek tersebut tidak ada, tidak mendapatkan perhatian yang sama, atau dalam bahasa sederhana disebut komunikasi tidak sejalan alias "nggak nyambung".

Keberhasilan komunikasi dipengaruhi oleh jenis komunikator dalam percakapan, antara lain:



Placeter

- Mengabaikan keinginannya sendiri.
- Ingin lawan bicaranya senang, tidak ingin berselisih.
- Penyebabnya adalah rasa inferioritas.



Blamer

- Orang yang tidak mau salah (merasa selalu benar).
- *Blamer* menyalahkan dan memerintah karena memiliki sifat superioritas kepada komunikan.



Computer

- Disebut juga *computing communicator*.
- *Computer* berupaya untuk tidak ada penyimpangan dan semuanya berjalan sesuai aturan dan kebiasaan.



Distractor

- Komunikator yang tidak ingin komunikasi yang kongruen terlaksana.
- Cenderung tidak fokus atas topik dalam proses komunikasi.



Leveler

- Berkomunikasi dengan kedudukan yang setara.
- Memperhatikan empat elemen komunikasi; dirinya sendiri, lawan bicara/orang lain, topik dan konteks.
- Memudahkan terwujudnya *win-win communication*/komunikasi kongruen.

FORMULA *i-message*

Ada lima formula bagi anda insan BPK untuk bisa menghasilkan *i-message*:

- 1. SENSING RASA** — apa yang Anda lihat, dengar atau rasakan secara inderawi?
- 2. EMOTION EMOSI** — perasaan seperti apa yang Anda rasakan secara psikologis?
- 3. WANT INGINKAN** — apa yang anda inginkan untuk mendukung atau mengatasi perasaan tersebut?
- 4. BEHAVIOUR PERILAKU** — apa tindakan, tingkah laku atau bantuan yang ingin Anda minta?
- 5. EFFECT DAMPAK** — apa akibat positif yang akan ditimbulkan dengan tingkah laku atau tindakan tersebut nantinya?

Ini contohnya:

Saat aku melihatmu meletakkan handuk di kasur, aku merasa kesal, supaya perasaanku membaik, aku ingin kamu mengambil dan menjemur handukmu pada tempatnya, karena dengan begitu kasurnya jadi tidak lembab, rapi, dan handuk juga tidak bau.



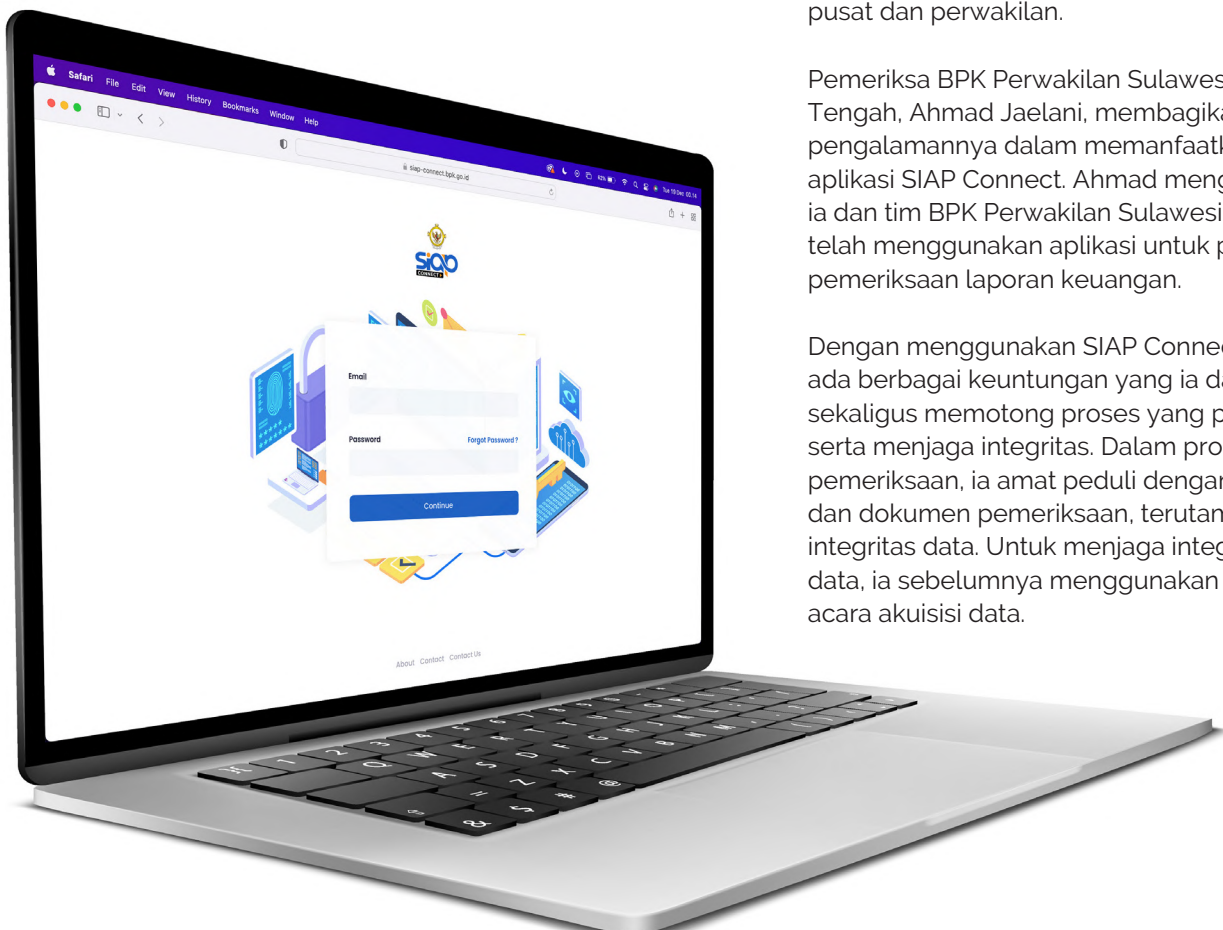
Permudah Proses Pemeriksaan

MELALUI APLIKASI SIAP CONNECT,
PEMERIKSA TIDAK PERLU MEMBUAT
BERITA ACARA AKUISISI DATA.

Biro Teknologi Informasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak awal 2023 meluncurkan Sistem Aplikasi Pemeriksaan atau SIAP Connect. Setelah melalui sosialisasi yang intensif, SIAP Connect sebagai pengganti aplikasi SIAP LK, kini telah digunakan oleh pemeriksa BPK di pusat dan perwakilan.

Pemeriksa BPK Perwakilan Sulawesi Tengah, Ahmad Jaelani, membagikan pengalamannya dalam memanfaatkan aplikasi SIAP Connect. Ahmad mengatakan, ia dan tim BPK Perwakilan Sulawesi Tengah telah menggunakan aplikasi untuk proses pemeriksaan laporan keuangan.

Dengan menggunakan SIAP Connect, ada berbagai keuntungan yang ia dapat sekaligus memotong proses yang panjang serta menjaga integritas. Dalam proses pemeriksaan, ia amat peduli dengan data dan dokumen pemeriksaan, terutama integritas data. Untuk menjaga integritas data, ia sebelumnya menggunakan berita acara akuisisi data.



"Jadi sidik jari data saya rekam saya masukkan berita acara supaya nanti kalau ada masalah di kemudian hari, sidik jari datanya, dia tahu, kalau datanya tidak saya edit," kata dia dalam Podcast Ngorbit atau Ngobrol Bareng IT.

Sidik jari data yang dimaksud, ucap dia, adalah data *hash file*. Data *hash file* tersebut dikunci sehingga saat dibutuhkan bisa dilihat bahwa *hash file* yang asli untuk memastikan validitas dan otentikasi data, bahwa data yang diterima itu tidak ada perubahan.

Melalui aplikasi SIAP Connect, pemeriksa tidak perlu membuat berita acara akuisisi data. Karena semua data diunggah ke aplikasi dan yang melakukannya adalah orang yang berwenang sendiri. "Jadi intinya, dokumen-dokumen yang dikirimkan secara digital tadi, bisa dipertanggungjawabkan," ucap dia.

Jaelani mengaku sudah menggunakan fitur di aplikasi SIAP Connect, baik di pemeriksaan laporan keuangan maupun pemeriksaan kepatuhan. Ia menjelaskan, di SiAP Connect ada beberapa menu yang sudah disiapkan oleh aplikasi. Salah satu menu utamanya itu adalah permintaan data.

Sebelumnya, permintaan data dilakukan manual, yaitu meminta surat permintaan data, dikirim ke entitas, kemudian entitas mengirim balik secara manual dengan *hardcopy* maupun *softcopy*. Nah kali ini, proses tersebut diwakili oleh sistem aplikasi SIAP Connect.

Jaelani mengatakan, langkah permintaan data amat memudahkan proses pemeriksaan. Walaupun pada awalnya, memang tidak langsung mulus, tapi setelah dua kali sosialisasi, entitas sudah terbiasa menggunakan aplikasi SiAP Connect untuk unggah data.

Dalam melakukan pemeriksaan keuangan, biasanya ada dua PIC. Pertama ada PIC untuk entitas yang bisa melihat keseluruhan dokumen atau data diminta. Sementara kedua adalah PIC Satuan Kerja. PIC sendiri adalah user yang didaftarkan oleh ketua tim. Jadi untuk aplikasi SiAP Connect ini entitas tidak mendaftarkan secara mandiri, namun pemeriksa, atau ketua tim harus mendaftarkan siapa-siapa saja yang bisa mengakses.

Dia sudah melakukan dua pemeriksaan menggunakan SIAP Connect. Untuk Pemeriksaan laporan keuangan pihaknya melakukan permintaan data sekitar 1.385 permintaan. Permintaan yang dimaksud seperti nomor SP2D hingga jenis pekerjaan.

"Jadi di satu permintaan itu banyak dokumen yang harus dikirimkan. Nah dari 1.385 permintaan itu, sekitar 1.187 kami terima kembali. Jadi entitas menyampaikan 1.187, dan yang kami nyatakan final itu baru 638 karena memang baru awal juga. Kaminya juga baru paham, mereka juga baru paham." tutur dia.



Kalau sekarang saya hanya perlu mengunduh dari aplikasi SiAP Connect. Selain itu lebih menghemat waktu. Biasanya harus menunggu entitas datang, menunggu surat disampaikan, sekarang tinggal mencari di aplikasi data yang dibutuhkan tersebut.

Ia juga menjelaskan bahwa aplikasi SIAP Connect membutuhkan jaringan. Ketua dan anggota tim harus menyadari kesediaan infrastruktur jaringan di setiap entitas.

Oleh karena itu, terkadang saat sosialisasi, entitas menyampaikan banyak kendala terutama terkait dengan bagaimana cara login dan unggah dokumen. Kendala dari entitas lain biasanya mungkin mereka belum tahu dokumen apa yang harus diunggah.

Untungnya, ucap dia, entitas pun mengakui bahwa setelah menggunakan ini merasakan beberapa keuntungan. Misalnya, bila sebelumnya ada risiko kehilangan data karena tercecer, saat ini mereka hanya tinggal mengunggah saja ke aplikasi.

Sementara dari sisi tim, integritas data dengan aplikasi SIAP Connect tetap terjaga. Setiap kali pemeriksaan, ia sebelumnya membutuhkan 200-500GB untuk menyimpan data.

"Kalau sekarang saya hanya perlu mengunduh dari aplikasi SiAP Connect. Selain itu lebih menghemat waktu. Biasanya harus menunggu entitas datang, menunggu surat disampaikan, sekarang tinggal mencari di aplikasi data yang dibutuhkan tersebut."

Pada intinya, tutur dia, SIAP Connect mendukung nilai-nilai yang dianut BPK yaitu Integritas, Independensi dan Profesionalisme. "Semua kini tidak lagi harus bertemu bertatap muka langsung, selain itu tersimpan di aplikasi tanpa takut data bocor." ~

BPK Harapkan Komunikasi dengan PT Pindad Dapat Berjalan Efektif

ANGGOTA VII BPK MENGAPRESIASI SELURUH JAJARAN DI PT PINDAD ATAS TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN YANG TELAH SESUAI DENGAN REKOMENDASI BPK HINGGA SEMESTER I TAHUN 2023.



■ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota VII BPK, Slamet Edy Purnomo

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berharap komunikasi antara pemeriksa dan semua pihak terkait dari PT Pindad dapat berjalan dengan baik dan efektif. "Komunikasi harus diartikan dengan memperhatikan dan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, independensi, dan profesionalisme," kata Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota VII BPK Slamet Edy Purnomo di kantor PT Pindad, Bandung, Kamis (2/11/2023).

Dia pun mengingatkan tentang perlunya komitmen untuk bekerja sama dalam tugas masing-masing. Termasuk menjaga agar jadwal pemeriksaan yang telah ditetapkan dapat terpenuhi secara tepat waktu. "Untuk itu, kami mengharapkan agar akses terhadap data dan dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pada PT Pindad dapat diberikan seluas-luasnya," tegasnya.

BPK memulai pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan PT Pindad, anak perusahaan, dan instansi terkait lainnya selama tahun 2021 s/d semester I 2023. Hal tersebut ditandai dengan dilakukannya *entry meeting* yang dipimpin oleh Anggota VII BPK.

Dia menjelaskan bahwa tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk menilai kesesuaian aktivitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan PT Pindad dan entitas lain yang terkait terhadap peraturan yang berlaku. "Selain itu, sasaran pemeriksaan diarahkan pada pengelolaan dan pertanggungjawaban pendapatan, pengelolaan dan



pertanggungjawaban beban/biaya, serta pengelolaan dan pertanggungjawaban investasi," ujar Slamet.

Dia menambahkan, lingkup pemeriksaan tersebut mencakup pengendalian dan realisasi kegiatan pendapatan, beban/biaya, dan investasi tahun 2021, 2022, dan semester I tahun 2023.

Mengakhiri sambutannya, Anggota VII BPK mengapresiasi seluruh jajaran di PT Pindad atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah sesuai dengan rekomendasi BPK hingga semester I tahun 2023. Ke depannya dia pun mengharapkan tindak lanjut atas rekomendasi dapat lebih ditingkatkan. ~



■ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota V BPK, Ahmadi Noor Supit

Anggota V BPK: Jangan Hanya Fokus Terhadap Angka, tapi Juga Dampak Nyata untuk Masyarakat

AHMADI PUN MENDORONG AGAR BPK RESPONSIF TERHADAP SUARA RAKYAT DAN Mencari MASUKAN DARI SEMUA *STAKEHOLDER*.

Para pemeriksa diingatkan untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan mengingat masih adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketidakpuasan masyarakat tersebut dapat menjadi indikasi bahwa ada harapan lebih dari sekadar laporan keuangan yang baik.

"Harus ada *alignment* antara opini dan harapan masyarakat, terutama dalam konteks peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ahmadi Noor Supit saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Auditorat Utama Keuangan Negara V (Rakornis AKN V), di Yogyakarta, Senin (13/11/2023).



Rakornis ini diharapkan menghasilkan output berupa bahan-bahan yang akan disinergikan dengan AKN VI untuk menyusun kebijakan bersama dalam pelaksanaan pemeriksaan dan hal-hal lain yang perlu disinergikan dan disepakati pada rapat koordinasi AKN V dan VI.

Selama ini, kata dia, opini atas laporan keuangan tidak selalu mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Misalnya, ketika BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap satu pemerintah daerah. Realitanya, masyarakat masih melihat kurangnya pembangunan, pelayanan publik, dan integritas kepala daerah di wilayah tersebut.

"Ini menjadi pekerjaan rumah BPK untuk tidak hanya memfokuskan pada angka-angka keuangan, tetapi juga pada dampak nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat," kata dia.

Oleh karena itu, Ahmadi pun mendorong agar BPK responsif terhadap suara rakyat dan mencari masukan dari semua *stakeholder*. Khususnya tentang area mana yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemeriksaan. BPK juga harus memastikan bahwa setiap temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan memberikan solusi yang efektif dan berkelanjutan.

"Komunikasi yang baik dengan para *stakeholder* sangat dibutuhkan untuk meningkatkan relevansi dan dampak dari temuan BPK," ujar dia.

Sementara itu, Auditor Utama Keuangan Negara V (Tortama KN V) Slamet Kurniawan dalam laporannya menyebutkan bahwa dalam rakornis ini peserta akan mengevaluasi pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran (TA) 2022. Kemudian membahas usulan kebijakan pemeriksaan LKPD untuk TA 2023.

Dengan menghadirkan narasumber dari eksternal dan internal BPK, rakornis yang dilaksanakan selama 13-14 November ini juga menjadi wadah *sharing knowledge*. Sehingga dapat memperkaya pengetahuan pelaksana BPK, khususnya pemeriksa di lingkungan AKN V dalam melaksanakan pemeriksaan pada masa mendatang.

"Rakornis ini diharapkan menghasilkan *output* berupa bahan-bahan yang akan disinergikan dengan AKN VI untuk menyusun kebijakan bersama dalam pelaksanaan pemeriksaan dan hal-hal lain yang perlu disinergikan dan disepakati pada rapat koordinasi AKN V dan VI," jelasnya.

Narasumber eksternal yang dihadirkan pada kesempatan ini adalah Senior Advisor Australian National Audit Office (ANAO) Kristian Gage yang menyampaikan pemaparan tentang "Performance Information and Key Audit Matters". Kemudian, Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY Maria Damayanti dengan paparan tentang "Updated Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)". ~



BPK Perwakilan Diminta Responsif Terhadap Kebutuhan Masyarakat Lokal

KAPASITAS RISET DAN PENYUSUNAN KAJIAN HARUS TERUS DIKEMBANGKAN OLEH BPK UNTUK MENDUKUNG FUNGSIONYA SESUAI DENGAN INTOSAI ACCOUNTABILITY ORGANIZATION MATURITY MODEL MELALUI PERAN *OVERSIGHT*, *INSIGHT*, DAN *FACILITATING FORESIGHT*.



■ Ketua BPK, Isma Yatun

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan harus dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Sekaligus mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pemerintahan melalui praktik yang tak hanya bersifat *top-down*. Akan tetapi, juga dapat mengakomodasi isu dan permasalahan sebagai bagian dari partisipasi masyarakat yang bersifat *bottom-up* dalam pelaksanaan mandat BPK.

"Hal ini adalah suatu inovasi yang tentunya dapat memperkaya pemahaman auditor BPK mengenai aspirasi masyarakat maupun program dan layanan publik yang telah terlaksana. Sehingga kelak dapat merumuskan program pemeriksaan yang lebih efektif, bermanfaat serta berdampak lebih signifikan bagi masyarakat," kata Ketua BPK Isma Yatun saat menutup diklat pengembangan kapasitas riset dan penyusunan kajian di BPK Perwakilan, Jumat (24/11/2023).



BPK, terutama BPK Perwakilan, memerlukan dukungan dan sinergi untuk mewujudkan *collaborative framework* agar dapat mengembangkan kapasitas riset secara profesional dan berkesinambungan.

Dia pun menegaskan bahwa BPK Perwakilan merupakan pihak yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah dan penyiapan bahan perumusan pendapat BPK. Secara geografis juga lebih dekat dengan masyarakat sehingga sangat memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerah.

"BPK, terutama BPK Perwakilan, memerlukan dukungan dan sinergi untuk mewujudkan *collaborative framework* agar dapat mengembangkan kapasitas riset secara profesional dan berkesinambungan," papar dia.

Untuk itu, lanjut Isma, para akademisi dari perguruan tinggi dengan kapasitas dan pengalamannya dalam dunia riset dapat menjadi kolaborator sekaligus pendamping. Baik dalam penyusunan metodologi, pelaksanaan, hingga publikasi hasil riset di BPK yang juga selaras dengan perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Kapasitas riset dan penyusunan kajian harus terus dikembangkan oleh BPK untuk mendukung fungsinya sesuai dengan

INTOSAI Accountability Organization Maturity Model melalui peran *oversight*, *insight*, dan *facilitating foresight*. Dalam peran *oversight*, riset dapat mendukung perencanaan pemeriksaan, yaitu untuk menentukan topik potensial. Sementara riset, dalam peran *insight*, dapat mendukung BPK dalam mengevaluasi kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah.

Sedangkan, riset dalam peran *foresight*, dapat mengidentifikasi dan menganalisis *driving forces*, tren, serta *emerging issues* yang dapat memengaruhi masa depan. Dengan demikian, hasilnya dapat membantu masyarakat luas dan para pembuat kebijakan dalam memilih alternatif kebijakan pada masa depan. Termasuk mengantisipasi ketidakpastian pada masa yang akan datang, terutama di era yang penuh *volatility*, *uncertainty*, *complexity*, dan *ambiguity* (VUCA).

Dalam laporannya, Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara (Renvaja) Bernardus Dwita Pradana menyebutkan bahwa diklat tersebut diikuti oleh 94 peserta. Diklat diinisiasi oleh Direktorat Utama Renvaja, difasilitasi oleh Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara, dan merupakan kolaborasi dan sinergi dengan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V, AKN VI, dan BPK perwakilan.

Selain itu kegiatan ini juga didukung oleh akademisi dan praktisi dari Universitas Tarumanegara, Universitas Sriwijaya, Universitas Khairun, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Kegiatan diklat ini selanjutnya akan diikuti dengan kegiatan *piloting* riset dan penyusunan kajian pada dua satuan kerja *piloting*, yaitu BPK Perwakilan Provinsi Sumatra Selatan dan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara. ~



Kolaborasi dan Sinergi dalam Pengelolaan Implementasi Renstra BPK 2020-2024

DUKUNGAN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF JUGA SANGAT DIPERLUKAN SEHINGGA IMPLEMENTASI RENSTRA BPK DAPAT BERHASIL.

Kolaborasi dan sinergi ikut menentukan keberhasilan pencapaian Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2020-2024. Karena keberhasilan itu membutuhkan personil untuk manajemen kinerja, manajemen pengetahuan, manajemen risiko, manajemen perubahan, dan pengelolaan anggaran. Seluruhnya harus secara aktif mengawal pelaksanaan dukungan kelembagaan tersebut serta mempunyai pemahaman yang memadai mengenai implementasi renstra unit dan satuan kerja.

Dukungan kelembagaan yang efektif juga sangat diperlukan sehingga implementasi Renstra BPK dapat berhasil. Karena keberhasilan pencapaian Renstra BPK 2020-2024 sangat ditentukan oleh keberhasilan implementasi strategi pencapaian renstra. Ini terdiri dari berbagai kegiatan rutin dan kegiatan prioritas (pemeriksaan strategis maupun inisiatif strategis).



■ Bernardus Dwita Pradana, Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara



Terkait dengan itu, Direktorat PSMK diberi tugas untuk menyelenggarakan Forum Manajer IKU yang wajib diikuti oleh seluruh manajer dan *inputer* IKU. Hal ini berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 320/K/X-XIII.2/7/2011 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Pengukuran Kinerja Berbasis Sistem Manajemen Kinerja.

Forum Manajer IKU kemudian dikembangkan menjadi Forum Pengelola Implementasi Renstra (Forum PIR). Forum ini diikuti oleh para pengelola kinerja, pengelola pengetahuan, pengelola risiko, pengelola perubahan, dan pengelola anggaran. Dengan begitu, dukungan kelembagaan dalam pengelolaan Renstra BPK dapat semakin efektif dan selaras dengan dinamika organisasi.

Forum PIR tahun 2023 dilaksanakan pada 24-28 November 2023 dengan menggunakan metode hibrida. Kegiatan luring digelar di kantor pusat dan daring melalui media *Zoom*.



Keberhasilan pencapaian Renstra BPK 2020-2024 sangat ditentukan oleh keberhasilan implementasi strategi pencapaian renstra.

Forum ini memiliki beberapa tujuan. Pertama, meningkatkan implementasi renstra secara lebih terintegrasi untuk memastikan tercapainya target yang diharapkan. Kedua, mendukung penyusunan Renstra BPK 2025-2029.

Salah satu agenda dalam forum berupa *sharing session* dari narasumber eksternal. Misalnya saja *sharing* "Pengelolaan Kinerja Organisasi yang Efektif dan Efisien" oleh GML Performance Consulting dan Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola, Bank Indonesia. Kemudian "Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan" dari Kementerian Keuangan.

Selanjutnya, seluruh pengelola implementasi renstra akan melakukan diskusi kelompok untuk membahas evaluasi IKU tahun 2023. Dilanjutkan dengan pengelolaan inisiatif strategis (IS), pemanfaatan aplikasi PRISMA Risiko, konsep pedoman GRKT, serta revisi pedoman pengetahuan, perubahan dan risiko. Kesempatan ini juga digunakan untuk meluncurkan aplikasi PRISMA-Risiko yang secara bertahap telah memenuhi transformasi digital dalam pengelolaan implementasi renstra. ~



Pengamanan Data

01

Cadangkan (*backup*) data secara teratur ke media yang terpisah.

05

Tidak memasang aplikasi yang tidak dipercaya (*bajakan*).

02

Aktifkan fitur Bitlocker.

06

Berhati-hati menggunakan media portabel (*flashdisk, external HDD*).

03

Pahami jenis-jenis file/data dan ciri-cirinya. Memahami *extension file*.

04

Memahami fungsi dasar file
Contoh : file ber-*extension .exe* merupakan file yang dapat dieksekusi oleh windows.



www.bpk.go.id



@bpkriofficial



@bpkri



08111907010



BPK RI Official



@humasbpkri.official



@bpk.ri

Pelaporan Kinerja Untuk Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Negara



LAODE NUSRIADI
AUDITOR UTAMA
KEUANGAN NEGARA VI BPK

SALAH SATU MUATAN PENGATURAN BARU ADALAH MENGENAI PENYAMPAIAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PUSAT (LKJPP) SEBAGAI LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP) *UNAUDITED*, OLEH MENTERI KEUANGAN KEPADA PRESIDEN DAN SELANJUTNYA DISAMPAIKAN KEPADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) UNTUK DILAKUKAN PEMERIKSAAN.

Pada pertengahan tahun 2023 terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Peraturan tersebut dimaksudkan mendorong penyederhanaan tata kelola keuangan negara yang meliputi perencanaan anggaran kementerian/lembaga (KL) dan Bendahara Umum Negara (BUN), revisi anggaran, tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan, pengendalian dan pemantauan serta evaluasi kinerja anggaran, dan pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi.

Salah satu muatan pengaturan baru adalah mengenai penyampaian Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKJPP) sebagai lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) *unaudited*, oleh Menteri Keuangan kepada Presiden dan selanjutnya disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan.

LKPP merupakan konsolidasi Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), sedangkan LKJPP merupakan kompilasi dari Laporan Kinerja Kementerian/Lembaga (LKjKL) yang menyajikan prestasi kerja berupa *output* (keluaran) dari suatu kegiatan atau *outcome* (hasil) dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Meskipun inisiatif tersebut terbatas pada lingkup pemerintah pusat, namun patut diapresiasi karena selama ini penyampaian laporan keuangan pemerintah *unaudited* untuk diperiksa oleh BPK, belum secara khusus dilampiri laporan kinerja pemerintah. Padahal, informasi kinerja sangat penting untuk menilai capaian realisasi kegiatan/program dikaitkan dengan persetujuan alokasi anggaran sebagai hasil dari kesepakatan politik.

Redaksi Majalah *Warta Pemeriksa* mengharapkan kontribusi dari rekan-rekan pembaca untuk mengirimkan tulisan dengan tema pemeriksaan maupun keuangan negara/daerah. Tulisan format doc minimal 7.000 karakter dapat dikirimkan melalui email wartapemeriksa@bpk.go.id dengan subjek 'Rubrik Kolom'.

Cantumkan nama lengkap, instansi/unit kerja dan nomor yang bisa dihubungi. Bagi artikel terpilih untuk dimuat akan diberikan apresiasi berupa fee menulis sebesar Rp750.000.

Lalu, hal-hal apa saja yang menjadi perhatian dalam pelaporan kinerja pemerintah?

Seperti diketahui, reformasi bidang keuangan negara terus bergulir sejak terbitnya paket Undang-undang Keuangan Negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, termasuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Secara umum, peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya tersebut mencakup pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mulai tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.

Pada tahap perencanaan pembangunan nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas mengatur bersama pelaksanaan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar kementerian/lembaga di lingkungan pemerintah pusat dan antar organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah, dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Penyelarasan dilakukan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional/Daerah (RPJPN dan RPJPD) dua puluh tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah (RPJMN dan RPJMD) lima tahunan, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah (Renstra KL dan Renstra OPD) lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah/Daerah (RKP dan RKPD) tahunan.

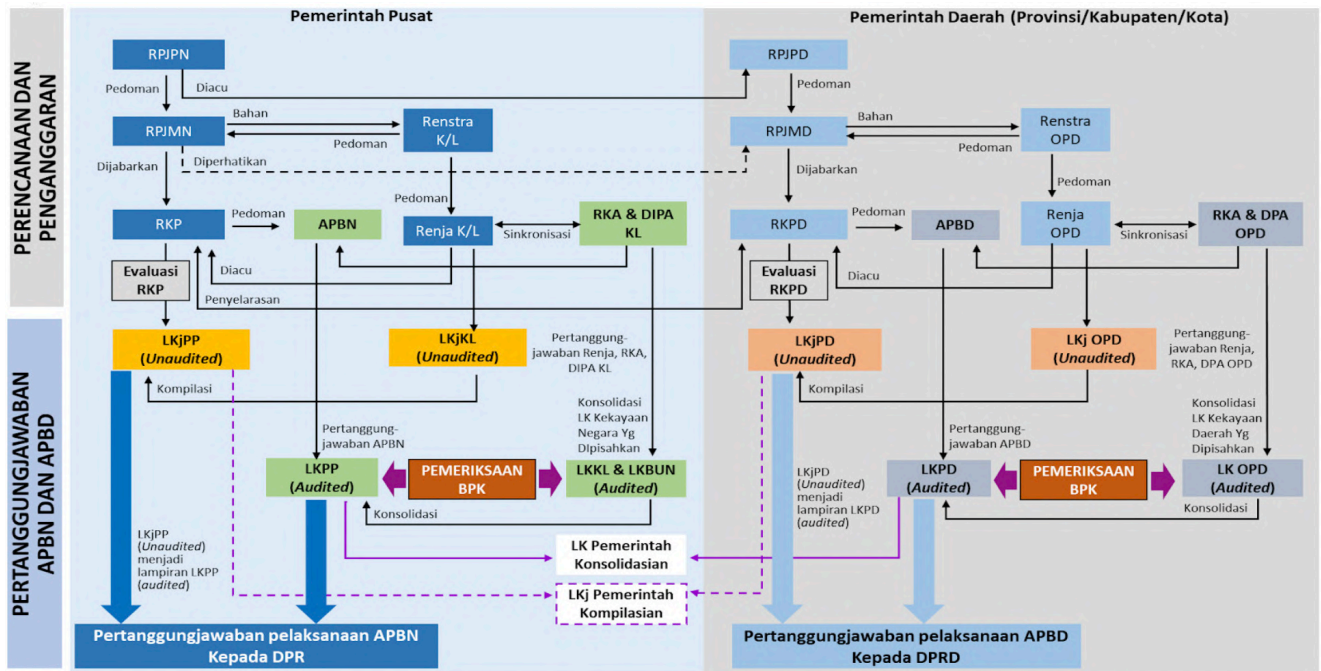
Selanjutnya, sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran tahunan di tingkat pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga, sedangkan di tingkat pemerintah daerah dilakukan oleh Kepala Bappeda, Kepala BKAD/BPKAD dan Kepala OPD, mengacu pada pola yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017. Sinkronisasi dilakukan terhadap Rencana Kerja Pemerintah/Daerah (RKP dan RKPD) tahunan, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah (Renja KL dan Renja OPD) tahunan, Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah (RKA KL dan RKA OPD) tahunan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN dan APBD).

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN untuk aspek kinerja tercermin pada LKjPP sebagai kompilasi dari LKjKL, sedangkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk aspek kinerja tercermin pada Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKjPD) sebagai kompilasi dari Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (LKjOPD). Penyusunan laporan kinerja mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai penjabaran lebih lanjut atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Sampai dengan tahun 2022, penyampaian LKjPP dan LKjOPD masing-masing kepada DPR dan DPRD dilakukan tanpa melalui pemeriksaan oleh BPK.

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN untuk aspek keuangan tercermin pada LKPP sebagai konsolidasi dari LKKL dan LKBUN, sedangkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk aspek keuangan tercermin pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai konsolidasi dari Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (LKOPD). Penyusunan laporan keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Pemeriksaan atas LKPP/LKKL/LKBUN dan LKPD secara rutin tiap tahun dilaksanakan oleh BPK.



Gambar 1. Kerangka Hukum Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dan APBD



Gambar 2. Proses Perencanaan, Penganggaran, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dan APBD

” **Dari hasil pemeriksaan BPK selama tahun 2018 – 2022 terhadap manajemen kinerja secara parsial di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, diketahui masih terdapat beberapa kelemahan yang dapat berdampak pada kualitas laporan kinerja pemerintah. Permasalahan tersebut ditemukan pada tahap perencanaan dan penganggaran belanja, pelaksanaan belanja, monitoring dan evaluasi belanja, dan pelaporan realisasi belanja.**

Dengan memperhatikan perkembangan kebutuhan informasi dan peraturan perundang-undangan terkait hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, maka sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan juga harus didukung dengan integrasi dan konsolidasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD secara nasional. Konsolidasian laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (LK Pemerintah Konsolidasian) telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/2018, sedangkan kompilasian laporan kinerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah (LKj Pemerintah Konsolidasian) saat ini belum dibuatkan pengaturannya.

KUALITAS MANAJEMEN KINERJA PEMERINTAH

Kualitas laporan keuangan pemerintah di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dari aspek keuangan tersebut, belum secara khusus mencakup pemeriksaan atas laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dari aspek kinerja.

Namun dari hasil pemeriksaan BPK selama tahun 2018 – 2022 terhadap manajemen kinerja secara parsial di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, diketahui masih terdapat beberapa kelemahan yang dapat berdampak pada kualitas laporan kinerja pemerintah. Permasalahan tersebut ditemukan pada tahap perencanaan dan penganggaran belanja, pelaksanaan belanja, monitoring dan evaluasi belanja, dan pelaporan realisasi belanja.

Tabel 1. Permasalahan Manajemen Kinerja Pemerintah Tahun 2018 – 2022

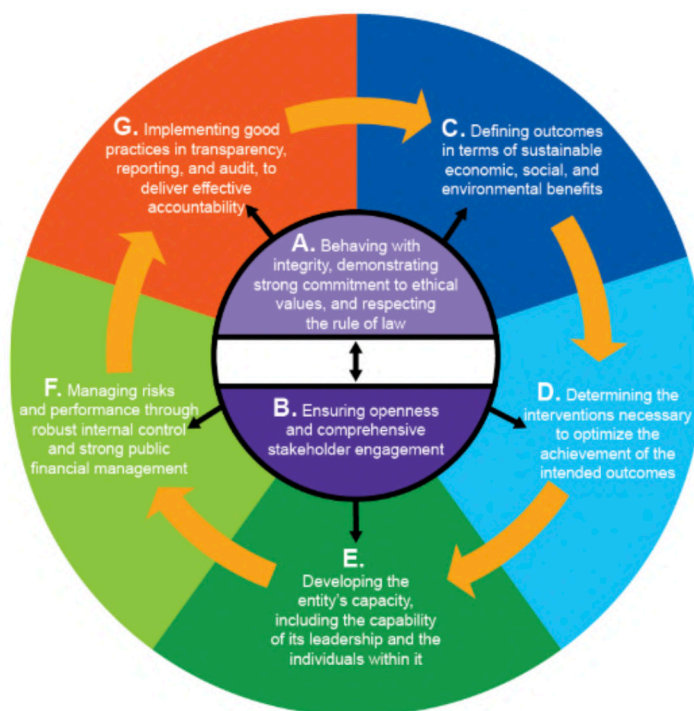
No	Tahapan	Uraian
1	Perencanaan dan Penganggaran Belanja	<ul style="list-style-type: none"> Proses perencanaan dan evaluasi kinerja anggaran dan kinerja pembangunan belum sepenuhnya didukung dengan Kerangka Kerja Logis (KKL) serta pengklasifikasian program KL belum selaras dengan RPJMN dan RKP; Sistem Informasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja anggaran serta evaluasi kinerja pembangunan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, belum memadai untuk menghasilkan data yang andal dan akurat; Perencanaan dan penganggaran pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum dapat menyajikan keselarasan program dan kegiatan serta keluaran (<i>output</i>); Sasaran, indikator, dan target Prioritas Nasional pada RKP belum diturunkan kepada masing-masing pemerintah provinsi dengan memperhatikan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
2	Pelaksanaan Belanja	<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif belum memiliki parameter dan indikator pencapaiannya; Realisasi anggaran atas pelaksanaan kegiatan tidak diikuti dengan pencapaian <i>output</i> kegiatan, dan capaian indikator sasaran Prioritas Nasional tidak mencapai target.
3	Monitoring dan Evaluasi Belanja	<ul style="list-style-type: none"> Hasil pengawasan serta pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja pembangunan belum memadai untuk mendukung perbaikan perencanaan penganggaran periode selanjutnya; Monitoring evaluasi kinerja anggaran dan pembangunan belum optimal untuk memastikan validitas serta akurasi pelaporan capaian <i>output</i>.
4	Pelaporan Realisasi Belanja	<ul style="list-style-type: none"> LKjPP belum menyajikan secara lengkap informasi capaian kinerja sasaran ekonomi makro dan sasaran utama pembangunan nasional sesuai dengan RKP; Belum terdapat keseragaman informasi realisasi anggaran berdasarkan sasaran strategis/program/ indikator kinerja; Belum selarasnya Bagan Akun Standar (BAS) pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan keuangan dan pelaporan informasi kinerja.

PANDUAN INTERNASIONAL

Mengacu pada *The International Framework: Good Governance in the Public Sector* yang diterbitkan bersama oleh *Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA)* dan *The International Federation of Accountants (IFAC)* tahun 2014, fungsi utama tata kelola di sektor publik adalah memastikan entitas publik dapat mencapai tujuan sesuai harapan pemangku kepentingan. Terdapat 7 (tujuh) prinsip tata kelola di sektor publik yang saling berhubungan satu sama lain. Prinsip A dan B mencakup penerapan prinsip C hingga G yang bersifat dinamis dan berkelanjutan melalui proses reviu dan evaluasi.

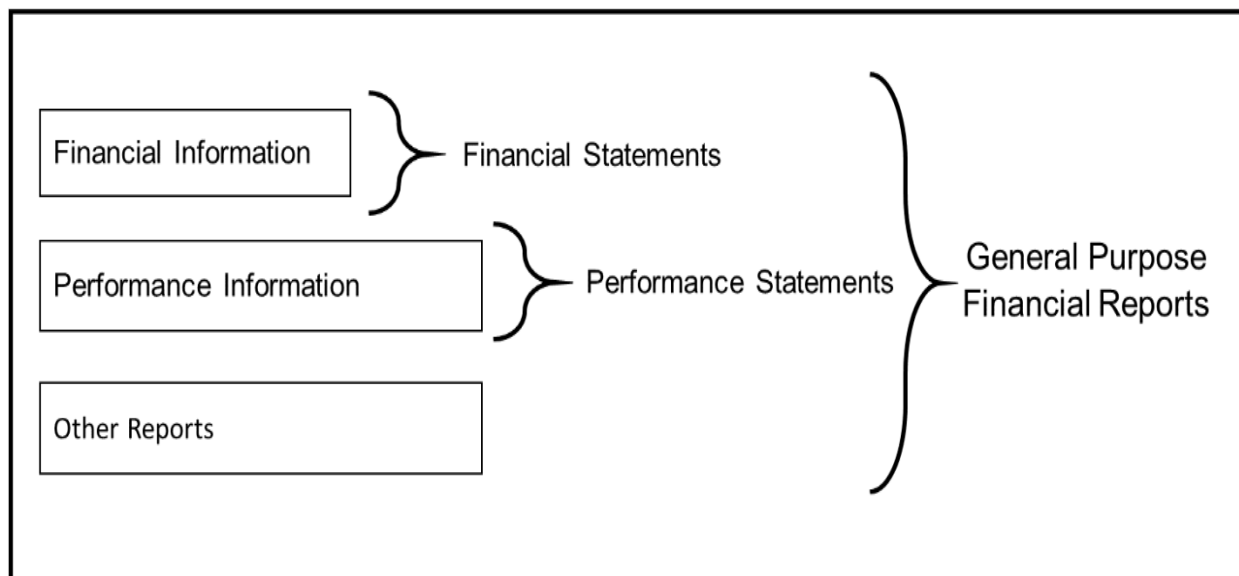
Dua prinsip tata kelola yang terakhir yaitu prinsip F dan G merupakan prinsip pelaporan keuangan sektor publik. Prinsip F menekankan peran manajemen risiko dan pengendalian intern untuk mendukung sistem manajemen kinerja dalam mencapai outcome. Prinsip G menekankan peran fungsi audit intern dan audit ekstern dalam mendukung efektivitas pelaporan yaitu memastikan pemangku kepentingan dapat memahami dan merespons informasi yang dilaporkan.

”**Terdapat 7 (tujuh) prinsip tata kelola di sektor publik yang saling berhubungan satu sama lain. Prinsip A dan B mencakup penerapan prinsip C hingga G yang bersifat dinamis dan berkelanjutan melalui proses reviu dan evaluasi.**



Gambar 3. Prinsip-prinsip Tata Kelola Sektor Publik (CIPFA & IFAC, 2014)

Sejalan dengan itu, *the International Public Sector Accounting Standards Board* (IPSASB) dengan difasilitasi oleh IFAC juga menerbitkan *The Conceptual Framework for General Purpose Financial Reporting by Public Sector Entities* tahun 2014. Kerangka konseptual tersebut menetapkan konsep-konsep yang menjadi dasar pengembangan standar internasional akuntansi sektor publik atau *International Public Sector Accounting Standards* (IPSASs) dan panduan praktik yang direkomendasikan atau *Recommended Practice Guidelines* (RPGs) sebagai acuan dalam pelaporan keuangan bertujuan umum pada sektor publik.



Gambar 4. Kerangka Pelaporan Keuangan Bertujuan Umum pada Sektor Publik (IPSASB, 2014)

Salah satu praktik yang direkomendasikan IPSASB adalah RPG 3 – *Reporting Service Performance Information*, yang memberikan panduan penyajian informasi tentang kinerja untuk tujuan akuntabilitas dan memenuhi kebutuhan pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Pengguna laporan keuangan mencakup warga negara, penyedia sumber daya, dan penerima layanan atau perwakilan masyarakat termasuk anggota lembaga perwakilan, ahli statistik, analis, media, penasihat keuangan, regulator, pengawas, lembaga pemeringkat, dan sebagainya.

The International Framework: Good Governance in the Public Sector (IFAC & CIPFA, 2014) dan *The Conceptual Framework for General Purpose Financial Reporting by Public Sector Entities* (IPSASB, 2014) tersebut dapat menjadi referensi dalam pengembangan manajemen kinerja dan manajemen keuangan termasuk pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan pemerintah di berbagai negara.

TANTANGAN KE DEPAN

Terdapat sejumlah upaya sekaligus tantangan agar integrasi pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan pemerintah dapat secara efektif mendorong peningkatan akuntabilitas keuangan negara, diantaranya yaitu:

1. Integrasi manajemen risiko dan sistem pengendalian intern

Manajemen risiko dan pengendalian intern atas pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja dirancang secara terintegrasi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya keandalan pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja. Sinkronisasi dilakukan baik pada tahap perencanaan dan penganggaran untuk memastikan kesesuaian antara alokasi anggaran dan rencana kegiatan/program maupun pada tahap pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan untuk memastikan kesesuaian antara realisasi anggaran dan capaian kinerja kegiatan/program.

2. Penyiapan informasi keuangan berbasis akuntansi akrual sesuai kebutuhan

Basis akuntansi akrual telah diimplementasikan sejak pelaporan keuangan pemerintah tahun 2015. Namun demikian, perlu dilakukan evaluasi dari waktu ke waktu atas perkembangan transaksi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan untuk mengidentifikasi kecukupan dan kebutuhan standar akuntansi dan informasi akrual dalam rangka pengukuran dan penyajian informasi keuangan dan kinerja kegiatan/program.

3. Penetapan kerangka pelaporan keuangan bertujuan umum

Standar Akuntansi Pemerintahan dievaluasi untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi bagi pengguna terhadap pelaporan keuangan bertujuan umum di lingkungan pemerintahan, dengan memperhatikan kerangka hukum pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, serta *best practice* di lingkungan sektor publik. Penetapan kerangka pelaporan keuangan bertujuan umum yang mengintegrasikan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dari aspek keuangan dan aspek kinerja diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan negara di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

4. Pengembangan standar dan strategi pemeriksaan yang terintegrasi

Dalam rangka memastikan kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD baik dari aspek keuangan maupun kinerja, maka pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah mencakup pemeriksaan atas laporan kinerja pemerintah. Untuk itu kapasitas pemeriksaan ditingkatkan mencakup pengembangan standar pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, dan kompetensi pemeriksa. Sebagai referensi dalam pengembangan standar pemeriksaan, *the International Auditing and Assurance Standards Board* (IAASB) menerbitkan *International Standard on Sustainability Assurance 5000* (ISSA 5000), *General Requirements for Sustainability Assurance Engagements* dan *International Standard on Assurance Engagements 3000* (Revised-ISA 3000) *to Extended External Reporting* (EER) *Assurance Engagements*. ISSA 5000 memperkenalkan elemen-elemen kunci yang memperkuat proses *assurance* dan mendorong *sustainability report* yang andal, sedangkan ISA 3000 memberikan panduan dalam *assurance* untuk *non-financial reporting* dan tidak terbatas pada *sustainability report* atau *Environmental Social and Governance*, pelaporan terintegrasi, pelaporan tanggung jawab sosial, dan pelaporan kinerja layanan di sektor publik.


5. Konsolidasi pelaporan pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah masing-masing melaksanakan kegiatan dan program yang didukung dengan anggaran. Konsolidasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD baik dari aspek keuangan maupun aspek kinerja akan mendukung pengalokasian sumber daya nasional yang efisien dan efektif untuk pencapaian tujuan negara.

PERLUNYA KETERLIBATAN BERBAGAI PIHAK

Integrasi pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja dalam kerangka pelaporan keuangan yang bertujuan umum sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dan APBD merupakan langkah strategis untuk tujuan peningkatan akuntabilitas keuangan negara dan pengambilan keputusan bagi para pemangku kepentingan.

Untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi sehubungan dengan integrasi pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja tersebut, dibutuhkan sinergi dari berbagai pihak antara lain: Pemerintah Pusat meliputi Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri; Pemerintah Daerah; Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP); Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); dan BPK. ~



Integrasi pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja dalam kerangka pelaporan keuangan yang bertujuan umum sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dan APBD merupakan langkah strategis untuk tujuan peningkatan akuntabilitas keuangan negara dan pengambilan keputusan bagi para pemangku kepentingan.



PENGAMANAN Email



Teliti sebelum membuka email

- Baca *subject*.
- Periksa alamat pengirim.
- Pastikan tidak ada hal yang mencurigakan.



Membuka email di perangkat yang dipastikan keamanannya.



Tidak membuka *attachment* atau klik link yang belum dapat dipastikan keamanannya/dikirim oleh orang tidak dikenal.

Berhati-hati jika harus membuka email di komputer publik (misalnya warnet atau komputer di bandara).



Pastikan *logout* dari aplikasi email jika menggunakan perangkat publik/orang lain.



www.bpk.go.id



@bpkriofficial



@bpkri



08111907010



BPK RI Official



@humasbpkri.official



@bpk.ri



1-7

Ketua BPK Isma Yatun didampingi Wakil Ketua BPK Hendra Susanto, Anggota II/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK Daniel Lumban Tobing, dan Anggota VII/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII BPK Slamet Edy Purnomo menghadiri *Focus Group Discussion* dan Rapat Konsultasi antara BPK RI dengan Komisi XI DPR RI, 30 Desember 2023.





8-17

Final lomba tenis meja BPK dihadiri Ketua BPK Isma Yatun dan Anggota I/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana, 9 November 2023. Pertandingan tenis meja ini merupakan rangkaian acara menyambut HUT ke-77 BPK RI.

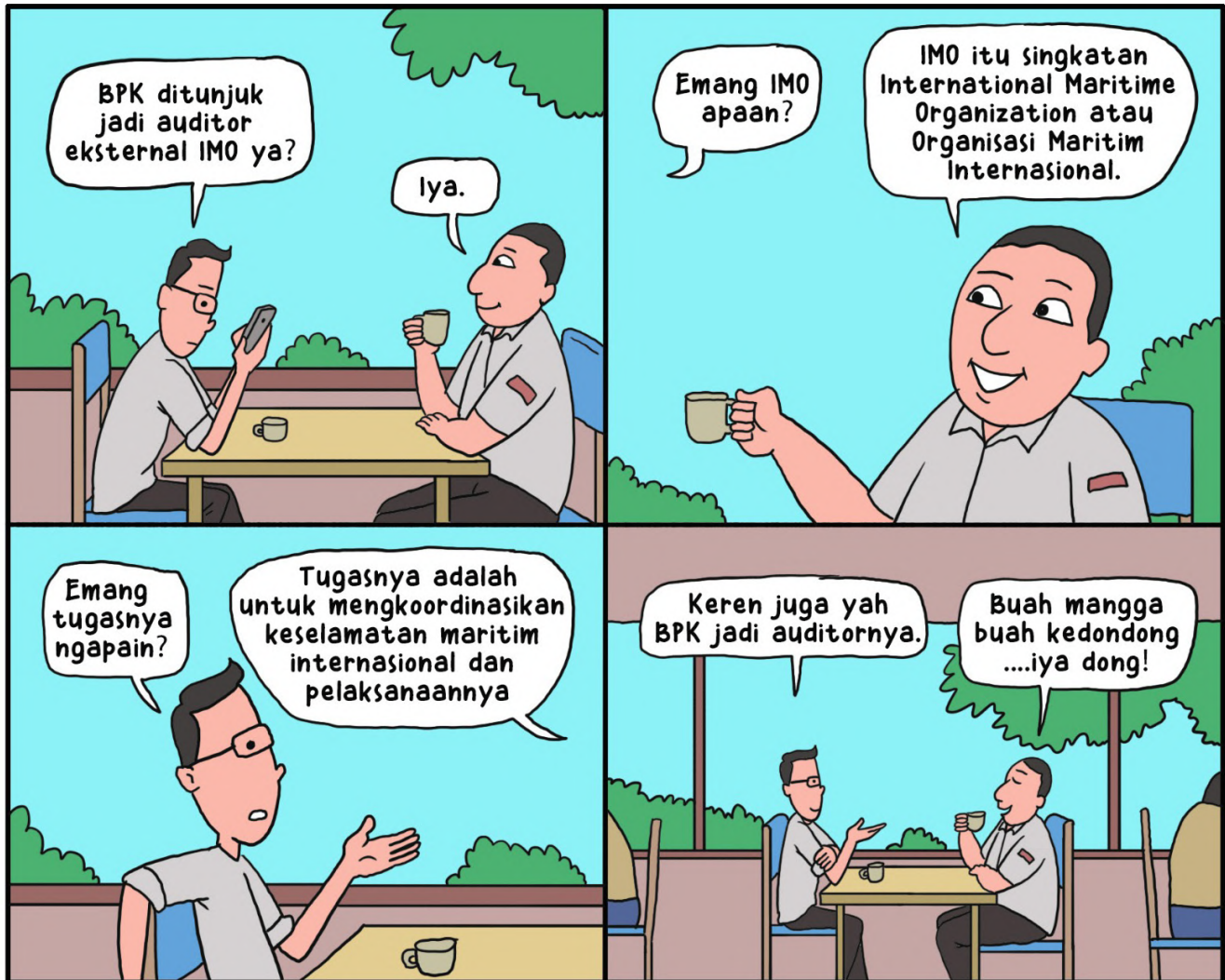
18-19

Supervisi Anggota IV/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK Haerul Saleh di Situbondo, Jawa Timur, 1 November 2023.

20-21

Courtesy meeting Anggota VII/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII BPK Slamet Edy Purnomo dengan Dirut Bank Mandiri, 20 November 2023.





KUIS

BPK terus berupaya memperkuat pemeriksaan kinerja. Salah satu upaya itu adalah dengan meningkatkan kemampuan auditor dengan menggelar pelatihan pemeriksaan kinerja, dengan menggandeng Australian National Audit Office (ANAO).

Tujuan dan fokus dari kegiatan tersebut adalah...

Redaksi menunggu jawaban paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah edisi ini terbit. Jawaban dapat dikirim melalui email wartapemeriksa@bpk.go.id dengan subjek 'Kuis'. Cantumkan nama lengkap, instansi/satuan kerja, dan nomor yang bisa dihubungi.

Redaksi menyiapkan hadiah menarik bagi satu orang penjawab tercepat dan tepat. Keputusan redaksi tidak dapat diganggu gugat.

Permintaan Informasi & Pengaduan Masyarakat Lebih Mudah Pakai PPID BPK Mobile

**Segera Unduh di Playstore
BPKawan!!**





SEMANGAT PAHLAWAN
UNTUK MASA DEPAN BANGSA
DALAM MEMERANGI KEMISKINAN
DAN KEBODOHAN



Selamat Hari Pahlawan

10 NOVEMBER 2023



FOTO: TOM FISK - PEXELS



www.bpk.go.id



[@bpkriofficial](https://www.instagram.com/bpkriofficial)



[@bpkri](https://twitter.com/bpkri)



08111907010



BPK RI Official



[@humasbpkri.official](https://www.facebook.com/humasbpkri.official)



[@bpk.ri](https://www.tiktok.com/@bpk.ri)